

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022**



**Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandungan PO box 71212,
Telpon (0517) 21066 Faxes. (0517) 21022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi yang dipercayakan.

Hal ini menunjukkan bahwa, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan disampaikan setiap tahun kepada yang berkepentingan terutama bagian yang tak terpisahkan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG



TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.
NIP. 19730117 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi	4
1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	4
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematikan Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	90
3.3 Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional dan Provinsi	93
BAB IV PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Rekomendasi	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUTR Tahun 2022	15
Tabel 3.2	Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022	19
Tabel 3.3	Kontribusi Capaian Kinerja DPUTR Terhadap Target RPJMD 2018-2023 Kab.HSS	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indeks Konektivitas Jalan dengan Target Kinerja 2022	21
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Konektivitas Jalan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023	23
Tabel 3.6	Capaian Output Kegiatan/Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	20
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan untuk Mendukung Ketercapaian IKU	30
Tabel 3.8	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2022	31
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	36
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra	38
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Irigasi Dinas PUTR Kab.HSS dengan Dinas PUPR Prov.Kalsel	38
Tabel 3.12	Capaian IKU Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	46
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 terhadap Target Akhir Renstra	48
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Program Penataan Bangunan tahun 2022	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase rumah	54

	tangga yang mendapatkan akses air minum layak	
Tabel 3.16	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	55
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2023	58
Tabel 3.18	Realisasi akses masyarakat terhadap sarana air bersih Kabupaten/Kota di Kalsel Tahun 2022	59
Tabel 3.19	Perbandingan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Air Bersih di HSS dengan Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2022	59
Tabel 3.20	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan untuk Meningkatkan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	62
Tabel 3.21	Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2022	63
Tabel 3.22	Capaian IKU Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	66
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Target Kinerja pada Akhir Renstra	67
Tabel 3.24	Realisasi akses masyarakat terhadap sarana sanitasi Kabupaten/Kota di Kalsel Tahun 2022	68
Tabel 3.25	Perbandingan Realisaasi akses masyarakat terhadap akses sarana sanitasi layak di HSS dengan Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2022	69
Tabel 3.26	Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Penunjang Capaian Kinerja akses sarana sanitasi layak Tahun 2022 .	71
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dengan Target 2022	75
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Persentase Kinerja terhadap target akhir Renstra Tahun 2023	77
Tabel 3.29	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran DPUTR tahun 2018 s/d. 2022	82
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas PUTR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas/Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi setingkat Eselon III, Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Disamping itu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam membantu tugas Kepala Dinas terdapat beberapa ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain : Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Ruang dan Pembina Jasa Konstruksi, untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian tugas sekretariat dijabarkan dalam 3 sub bagian, yaitu
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan

rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- 2)** Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3)** Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4)** Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 5)** Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.
- 6)** Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. UPTD Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas dibidang Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Disamping itu juga melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pemenuhannya, sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang infrastruktur.

- b. Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang belum memadai.
- c. Kondisi alam yang kurang kondusif, sehingga menghambat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
- d. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur yang sudah terbangun.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari isu-isu pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta memperhatikan dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.

b. Bidang Sumber Daya Air

Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian.

c. Bidang Cipta Karya

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan fasilitas sarana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang kabupaten belum bisa mengoptimalkan agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Disamping itu sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- l. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini terdiri atas 4 (empat) Bab sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja mencakup: Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja mencakup: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup mencakup: Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Srategis Perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Mewujudkan Aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan Daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan Misi ke satu yaitu terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu akses sarana air bersih layak dan akses sarana sanitasi layak, serta misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Dinas PUTR Tahun 2018-2013 dengan 6 (enam) buah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis tersebut. Berikut ini ditampilkan data realisasi kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra tahun 2019-2021 dan target kinerja tahun 2022-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi			Target	
			2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Indeks Konektivitas Jalan	3.581	3.595	3.622	3,628	3.642
		2. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	61,90%	65,60%	68,49%	69,10%	71,43%
		3. Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	23,80%	47,52%	66,66%	85,71%	100%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	81,00%	82,35%	83,64%	84,40%	85,90%
		5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	77,96%	80,34%	83,13%	85,00%	90,00%
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	6. Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	75%	75%	75%	94%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan IKU dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Penanggung Jawab
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Bidang Bina Marga
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pertanian perlu didukung oleh infrastruktur irigasi yang memadai	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu bangunan yang berkualitas	Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Bidang Cipta Karya
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	Mengimplementasikan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang dan Jaskon

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Adapun kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Persen	3,628
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	69,10%
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	85.71%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Persen	84,40%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Persen	85,00%
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	Persen	94,00%

Program

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggaran Rp. 31.334.193.000
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 58.993.651.976
3. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 34.424.757.823
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 5.577.194.000
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.796.833.000
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.535.844.000
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.459.135.500
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 685.364.200
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.652.235.685

Kandangan, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Bupati Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. Achmad Fikry, MAP

Pihak Kedua
Kepala Dinas PUTR,




Tedy Soetedjo, ST, MT
NIP. 19730130 199803 1 009

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu Perangkat daerah yang menunjang pencapaian misi III RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, disamping itu juga menunjang pencapaian misi I yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana air bersih dan sanitasi yang layak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUTR Tahun 2022

Sasaran Strategis I : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi				
NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Konektivitas Jalan	3,628	3.635	100.19%
2	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69.10%	70.47%	101.98%
3	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	85.71%	85.71%	100.00%
Sasaran Strategis II : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman				
NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	84,40%	85,44%	101,23%
5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	85,00%	87,01%	102,36%

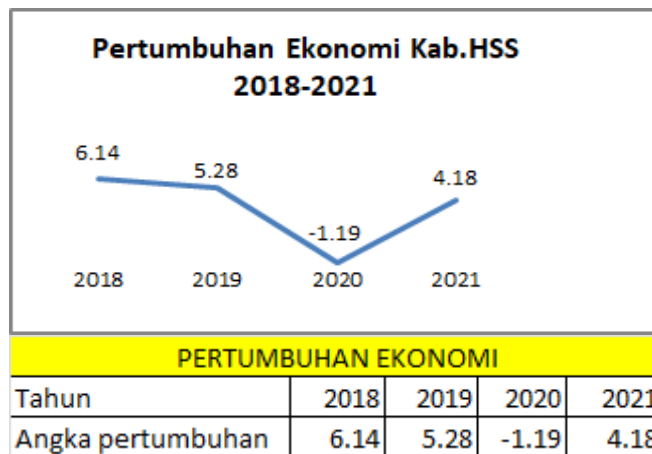
Sasaran Strategis III : Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya				
NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	94.00%	80.00%	85.11%

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 indikator kinerja utama terdapat 5 indikator kinerja utama yang telah mencapai target dan 1 indikator kinerja utama yang tidak mencapai target yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Hal ini akan dijelaskan dalam analisa dibawah ini.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis I : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	
Indikator Kinerja	1.1 Indeks Konektivitas Jalan
	1.2.Persentase kinerja sistem jaringan irigasi
	1.3.Persentase bangunan publik yang berfungsi baik

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses perubahan kondisi ekonomi secara berkesinambungan, menuju ke keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi akibat beberapa faktor antara lain sumber daya alam, infrastruktur, teknologi dan kebijakan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dinas PUTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan irigasi untuk menunjang sektor pertanian, pariwisata dan sektor lainnya. serta pembangunan bangunan publik untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

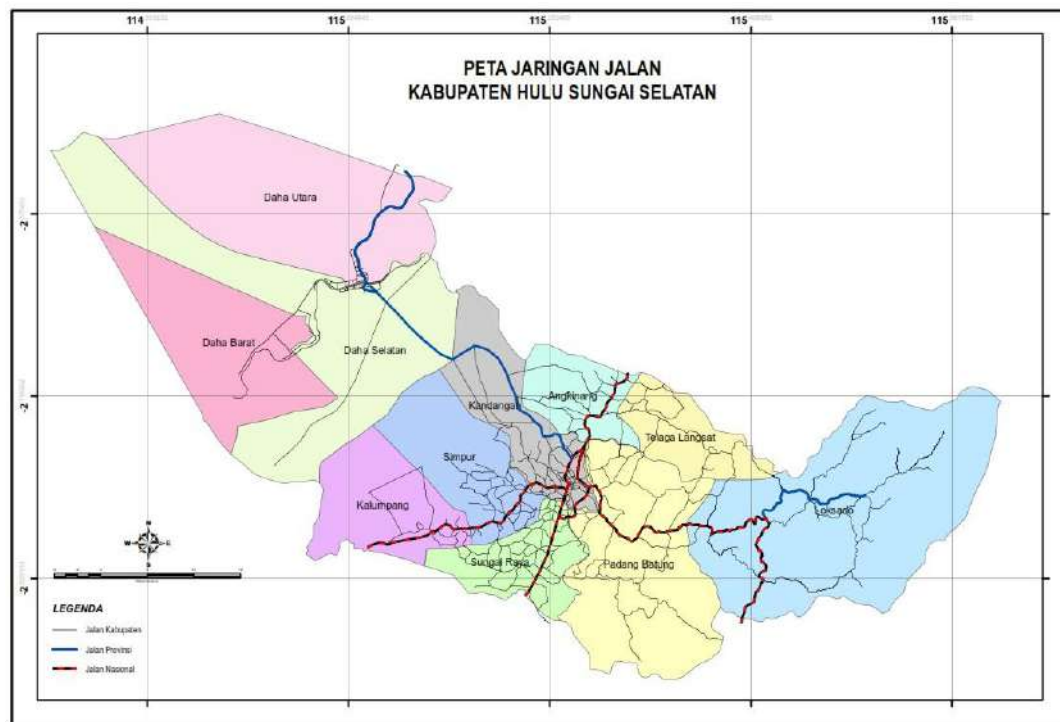
IKU 1.1 : Indeks Konektivitas Jalan

Infrastruktur jalan sangat penting dalam meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat dan barang. Fungsi jalan dan jembatan sebagai penghubung antar wilayah pusat-pusat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat baik di bidang transportasi, pertanian, olahraga, pariwisata dan pendidikan. Maka secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari berbagai sektor. Untuk kelancaran distribusi barang dan orang perlu adanya konektivitas jalan dan kualitas jalan dalam kondisi mantap.

Di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada misi III untuk sasaran strategis kondisi meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas ditetapkan target kinerja

Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam tahun 2022 sebesar 65,80%. Jalan Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sehingga pengguna jalan dapat melaju pada kecepatan > 40 Km/Jam.

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kewenangan terdiri dari Jalan Nasional yang mempunyai 7 ruas dengan panjang 82,95 km, Jalan Provinsi sebanyak 5 ruas dengan panjang 53,99 km, dan jalan kabupaten yang mempunyai 325 ruas dengan panjang 859,36 km. Adapun existing jaringan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Untuk mengetahui kondisi jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka pada Tahun 2022 telah dilaksanakan survey kondisi PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) pada 325 ruas jalan kabupaten dengan metode SDI (*Surface Distress Index*). Metode survey SDI adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang menentukan penentuan besaran SDI adalah kondisi retak pada permukaan jalan dari total

ruas, lebar retak rata-rata jumlah lubang per 100 meter serta kedalaman bekas roda/rutting. Hasil survey tersebut dimasukan kedalam form SDI yang kemudian dari form tersebut nantinya akan dimasukan ke form exel RCS aspal/beton atau kerikil/tanah untuk mengetahui kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Adapun hasil survey secara ringkas rekapitulasinya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Kategori	Panjang Jalan	Persentase
1	Baik	435,27 KM	50,65%
2	Sedang	162,69 KM	18,93%
3	Rusak Ringan	127,97 KM	14,89%
4	Rusak Berat	133,44 KM	15,53%
Jumlah		859,36 KM	100%

Dari hasil survey tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap (kategori baik dan sedang) mencapai 597,96 KM. Dengan demikian kondisi jalan mantap jika dibandingkan dengan panjang jalan Kabupaten maka persentasenya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Jalan Mantap} &= \frac{\text{Kondisi Jalan mantap (Baik + Sedang)}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{595,96 \text{ KM}}{859,36 \text{ KM}} \times 100\% = 69,58\% \end{aligned}$$

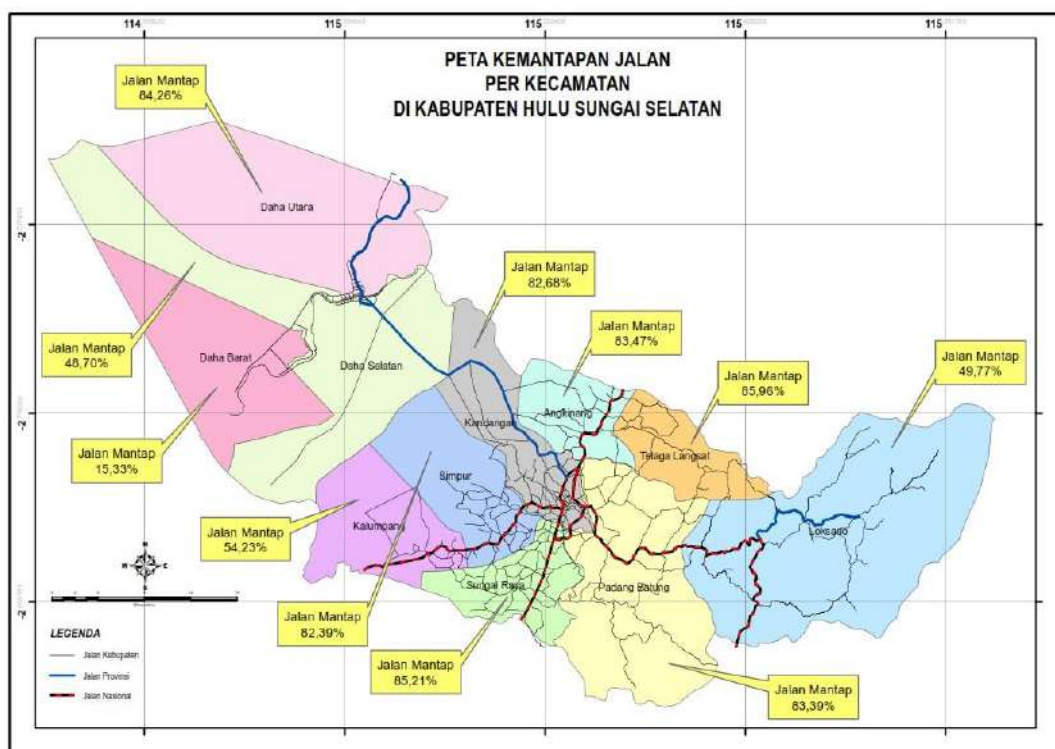
Data ini menunjukkan Dinas PUTR berkontribusi untuk mencapai target kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada misi III yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Kontribusi Capaian Kinerja DPUTR Terhadap Target RPJMD 2018-2023 Kab.HSS

Misi III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan

sosial yang menunjang sektor perekonomian				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	65,80	69,58	105,75%

Adapun sebaran kondisi kemantapan jalan per wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada peta berikut ini.



Konektivitas jalan sangat penting untuk kelancaran lalu lintas dan distribusi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian diberbagai sektor seperti pertanian, pariwisata dan sektor lainnya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

a). Perbandingan Realisasi Indeks Konektivitas Jalan dengan target Kinerja Tahun 2022

Indeks konektivitas merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi disuatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.

Indeks konektivitas adalah perbandingan antara jumlah satuan pemukiman (kota) dalam suatu wilayah dengan jumlah jaringan system transportasi (jalan) yang menghubungkan kota tersebut dengan wilayah kota-kota lainnya. Data yang dibutuhkan untuk mengukur indeks konektivitas adalah jumlah jalan penghubung antar kecamatan dan antar desa/kelurahan. Dengan rumus

IK Jalan = $\frac{\text{Jumlah ruas jalan}}$

$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$

Jumlah rusa jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai tahun 2022 sebanyak 538 sedangkan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 148 Desa/Kelurahan yang tersebar pada 11 Kecamatan. Kondisi Jalan dari Kota Kandangan ke ibu kota Kecamatan semua sudah terkoneksi dengan jalan dalam kondisi baik. Kemudian dari ibu kota Kecamatan ke Desa-Desa sebagian besar sudah terhubung dengan jalan demikian pula antar desa bahkan sebagian sudah terhubung dengan lebih dari satu ruas jalan. Hanya pada beberapa wilayah Desa yang dihubungkan dengan jalur sungai untuk wilayah perairan, sedangkan pada wilayah pegunungan ada beberapa wilayah bagian desa yang dihubungkan dengan jalan yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, namun demikian rata-rata indeks konektivitas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan jumlah ruas jalan dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IK = \frac{538}{148} = 3,635$$

148

Untuk mengetahui keberhasilan capaian kinerja , maka berikut ini akan diperbandingkan realisasi Indeks konektivitas jalan dengan target kinerja tahun ini yang terlihat pada tabel berikut ini.

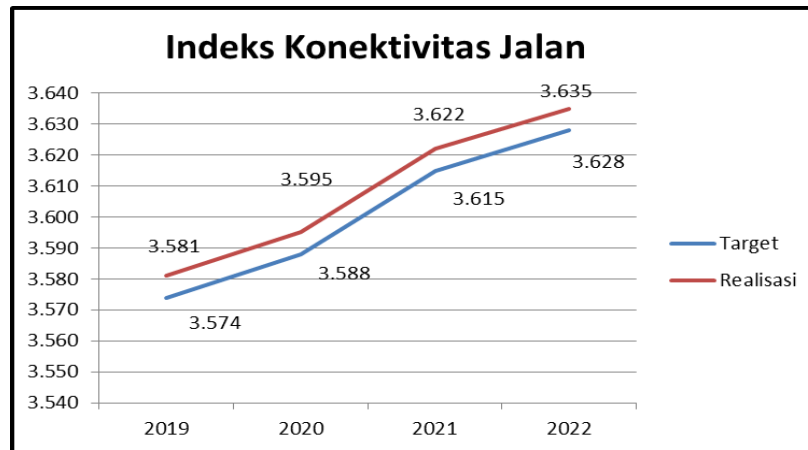
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Persentase Konektivitas Jalan
Kondisi Mantap dengan Target Kinerja 2022

Sasaran Strategis I : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi				
NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.1	Indeks konektivitas jalan	3,628	3.635	100.19%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja dapat dicapai dengan baik dengan capaian 100,19%. Hal ini karena pelaksanaan program didukung dengan anggaran yang cukup besar sesuai kebutuhan dari APBD maupun dana yang bersumber dari DAK bidang Jalan.

b). Perbandingan Capaian Indeks Konektivitas Jalan Dalam Beberapa Tahun Sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 4 (empat) tahun terakhir pelaksanaan Renstra yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	3.574	3.588	3.615	3.628
Realisasi	3.581	3.595	3.622	3.635

Sumber : Bidang Bina Marga DPUTR Tahun 2022

Perkembangan capaian Indeks Konektivitas Jalan 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga capaian tidak terlalu besar meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

c). Perbandingan Realisasi Kinerja Kumulatif Tahun ini dengan Target Akhir RENSTRA

Renstra DPUTR disusun untuk perencanaan periode 2018-2023, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-4. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Konektivitas Jalan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023

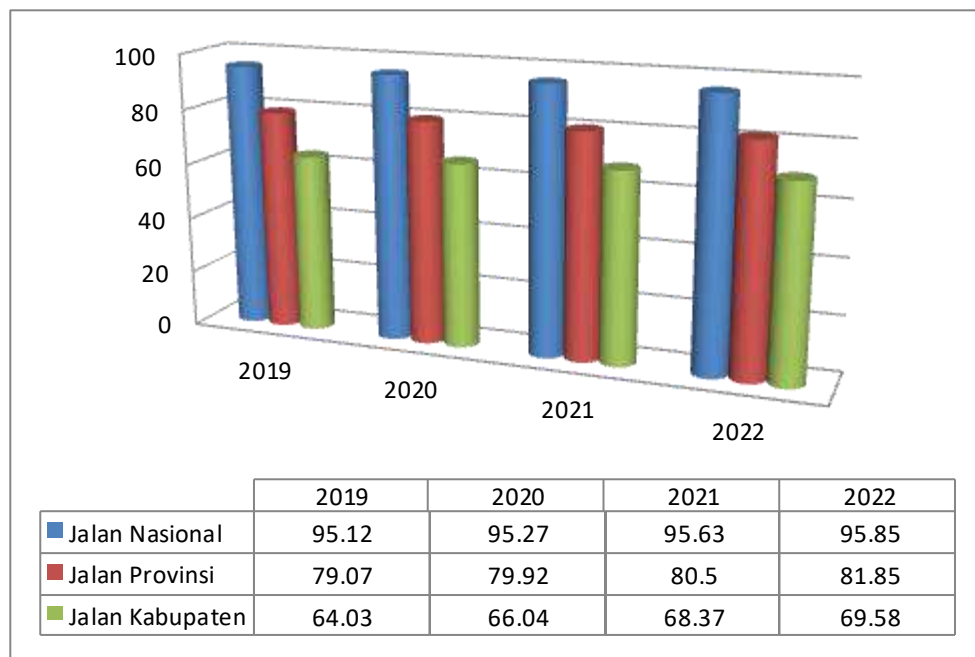
NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra (2023)	Capaian
1.1	Indeks konektivitas Jalan	3.635	3.642	99,80 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun realisasi kinerja telah mencapai target tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 masih belum mencapai. Namun demikian melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang cenderung meningkat maka target akhir Renstra optimis dapat dicapai. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan berusaha mencari sumber anggaran lain melalui usulan DAK ke Kementerian PUPR.

d). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Dinas PUPR provinsi Kalsel dan Nasional bidang jalan berbeda-beda sehingga tidak bisa diperbandingkan. Namun untuk data capaian kondisi jalan mantap jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Perbandingan Perkembangan Kondisi Jalan Mantap pada ruas Jalan Nasional, jalan Provinsi dan Jalan Kab.HSS Th 2019-2022



Perkembangan kondisi jalan mantap Kab.HSS, Provinsi Kalsel dan nasional dalam 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Namun persentase jalan kabupaten lebih rendah dari jalan provinsi dan nasional. Hal ini karena jalan kabupaten cukup panjang dan untuk peningkatan jalan atau pemeliharaan jalan diperlukan anggaran yang cukup besar sementara ketersediaan anggaran di APBD terbatas. Maka upaya yang terus dilakukan dengan berusaha mendapatkan anggaran tambahan dari provinsi maupun pemerintah pusat melalui DAK bidang jalan.

e). Program dan Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Pencapaian Kinerja Utama

Program dan Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja Indeks Konektivitas Jalan yaitu melalui program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan Jalan, berupa paket pekerjaan pembangunan tahap 2 jalan menuju stadion 2 Desember untuk menunjang kegiatan Porprov Kalimantan Selatan tahun 2022 senilai Rp. 4.998.990.150,-



- b. Pelebaran Jalan Menuju Standar, berupa paket Jasa Penilaian kemantapan jalan berdasarkan kondisi jenis permukaan jalan (aspal dan perkerasan beton) senilai . 4.273.126.615.



Pelebaran Jalan Bakarung - Rantauan Kec. Kandangan/ Kec. Angkinang

- c. Rekonstruksi Jalan berupa perbaikan jalan yang rusak, melalui peningkatan konstruksi senilai 15.075.975.693,-



Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Jl. Siang Gantung - Ds. Baru Kec. Daha Barat.

- c. Rehabilitasi Jalan berupa perbaikan spal dan perkerasan beton jalan yang rusak sedang dengan dana sebesar. 27.883.844.040,-



Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau

- d. Pemeliharaan Berkala Jalan berupa paket pekerjaan penyirangan jalan, pembuatan drainase jalan, pengecoran bahu jalan dan penahan longsor jalan senilai Rp. 8.8231.010.075,-



Pekerjaan Penanganan Longsor di Desa Hulu Banyu Kec. Loksado



Perbaikan Saluran Drainase Jl. Bakarung Tengah - Karang Jawa

Kec. Padang Batung

- e. Pemeliharaan Rutin Jalan berupa enutupan/penambalan lubang jalan (Patching) secara setempat-setempat, pemasangan bronjong, perbaikan saluran drainase dan pengadaan material dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.568.563.000,-



Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Budi Bakti - Tiga Desember Kec. Kandangan



Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Tabihi - Telaga Langsat

- f. Pembangunan Jembatan berupa pembangunan jembatan di Kecamatan Daha Selatan. Pembangunan jembatan tersebut ditunda sementara karena kendala lahan yang tidak ada kesepatan harga tanah dengan masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 899.640.000,-

- g. Penggantian Jembatan, berupa penggantian jembatan kayu menjadi jembatan beton (Box Culvert) dan perbaikan Jembatan gantung yang sumber dana berasal dari APBD Kab. HSS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 949.163.750,-



Perbaikan Jembatan Gantung Lungau Kec. Kandangan

- h. Pemeliharaan Rutin Jembatan berupa perbaikan lantai jembatan kayu, pemasangan bronjong jembatan dan pengurangan oprit jembatan dengan realisasi anggaran sebesar



Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pabahanan Desa Sirih Hulu Kec.

Rp. 802.847.740,-

Kalumpang

Disamping itu untuk penanganan infrastruktur jalan yang rusak akibat dampak banjir, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

f). Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Target kinerja Indeks Konektivitas Jalan pada tahun 2022 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Rehabilitasi Jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas jalan.

Namun demikian dalam pelaksanaan paket pekerjaan tidak lepas dari adanya permasalahan, namun hal ini dapat diantisipasi, antara lain :

- a. Keadaan iklim/cuaca yang sulit di prediksi
- b. Kurang koordinasi antar bidang pada saat pelaksanaan pekerjaan dimana terdapat pekerjaan yang bersamaan waktu pelaksanaannya dan lokasinya yaitu pekerjaan Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau Kec. Simpur dengan pekerjaan Normalisasi sungai di Desa Hanau.

g). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil dan sumber daya pembiayaan/anggaran.

Bidang Bina Marga saat ini memiliki 17 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100 \% - (\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)$$

Target Biaya

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2022 Jumlah Pagu Anggaran pada Bidang Bina Marga tahun 2022 yaitu sebesar

Rp. 81.238.202.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.283.161.063,- Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu 80,36% dengan persentasi capaian IKU 78,71%. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

h). Analisis Capaian Output Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian target kinerja dilaksanakan program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan capaian output kegiatan/sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Output Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	0,50 km	0,65 km
1.	Pelebaran Menuju Standar	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	3,10 km	2,59 km
2.	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi	6,95 km	7,42 km
3.	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	23,90 km	17,76 km
4.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	4,85 km	15,52 km
5.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin	1,00 km	0,44 km
6.	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	1 Unit	0 Unit
7.	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian	85,00 m	45,40 m
8.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	43,75 m	75,00 m

Output dari pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Bidang Bina Marga Tahun 2022 sebagian besar dapat dicapai melebihi target, namun untuk sub kegiatan pembangunan jembatan berupa pembayaran ganti rugi lahan tidak bisa direalisasikan karena pemilik tanah

menolak untuk dibayarkan sesuai hasil perhitungan tim penilai harga.

i). Realisasi Fisik dan Keuangan Program & Kegiatan Tahun 2022 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama

Program dan kegiatan Bidang Bina Marga beserta capaian realisasi fisik dan keuangan yang terkait dalam pencapaian target Persentase Konektivitas Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7
Program dan Kegiatan untuk Mendukung Ketercapaian IKU**

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Rp	Rp	%	%
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan Jalan	5.912.777.380,-	4.998.990.150,-	84,55	100,00
2	Pelebaran Menuju Standar	4.821.709.200,-	4.273.126.615,-	88,62	100,00
3	Rekonstruksi Jalan	15.354.031.700,-	15.075.975.693,-	98,19	100,00
4	Rehabilitasi jalan	30.117.438.100,-	27.883.844.040,-	92,58	100,00
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.109.264.000,-	8.831.010.075,-	96,95	100,00
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.775.044.000,-	1.568.563.000,-	88,37	100,00
7	Pembangunan Jembatan	12.201.500.000,-	899.640.000,-	7,37	7,99
8	Penggantian Jembatan	958.894.000,-	949.163.750,-	98,99	100,00
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	987.544.000,-	802.847.740,-	81,30	100,00
	JUMLAH	81.238.202.380,-	65.283.161.063,-	80,36 %	89,77%

Pada pelaksanaan Kegiatan Bidang Bina Marga tahun 2022 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sub kegiatan pembangunan kegiatan berupa penggantian biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan yang tidak bisa direalisasikan, karena adanya warga pemilik tanah yang tidak setuju dengan biaya pembebasan tanah yang dihitung oleh tim penilai harga sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan.

IKU 1.2 : Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi

Di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada misi III untuk sasaran strategis kondisi meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas salah satu indikator kinerja pengukuran keberhasilannya yaitu Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi, dengan target tahun 2022 sebesar 69,10%. Untuk mencapai target tersebut Dinas PUTR merupakan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab untuk mencapai kinerja tersebut. Maka Indikator kinerja ini juga menjadi salah satu indikator kinerja di dalam Renstra Dinas PUTR dengan target kinerja yang sama sebagaimana di dalam RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan.

Untuk menghitung realisasi Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air setiap tahunnya melaksanakan kegiatan E-PAKSI, dimana data yang dihasilkan terkait hasil survei kondisi bangunan irigasi dengan klasifikasi baik, rusak ringan, rusak sedang dan berat. Data tersebut sebagai acuan untuk evaluasi akhir tahun dan merencanakan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi. Untuk detailnya dapat ditampilkan secara global dan rincian hasil kondisi terakhir di tahun 2022 pada irigasi permukaan dan rawa, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2022

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan (ha)			
		Baik	Ringan	Sedang	Berat
1	Irigasi permukaan	7.947	1.437	1.937	785
2	Irigasi rawa	1.682	108	600	1.350

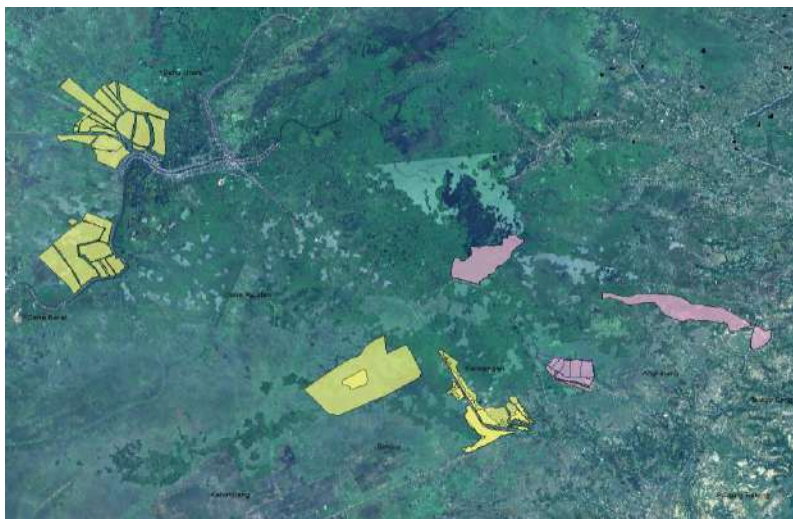
Adapun luasan kondisi irigasi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut pada tabel di atas akan tampak lebih jelas perbandingannya dalam fisualisasi dalam gambar peta berikut ini. Peta Daerah Irigasi Permukaan



- Keterangan :
- Kondisi Baik
 - Kondisi Rusak
 - Belum Tertangani

Dari gambar peta di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 11 Bendung yang telah mengalami rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dimana terdapat penambahan 184 ha luas fungsional jaringan irigasi yang telah mengalami perbaikan, sehingga kondisi bangunan menjadi lebih baik. Adapun untuk daerah irigasi rawa dapat dilihat pada peta berikut ini.

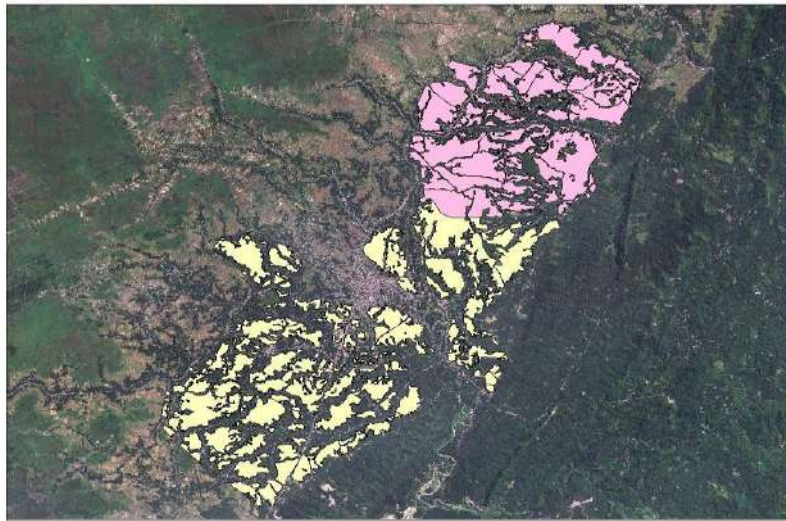
Peta Daerah Irigasi Rawa



- Keterangan :
- Kondisi Baik
 - Kondisi Rusak

Daerah irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat kewenangan Balai dan Pemerintah Provinsi Kalsel yaitu Daerah Irigasi Amandit dan Daerah Irigasi Telaga Langsung, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Peta Daerah Irigasi Kewenangan Balai Wilayah Sungai di HSS



Keterangan :

DI Amandit



DI Telaga Langsung



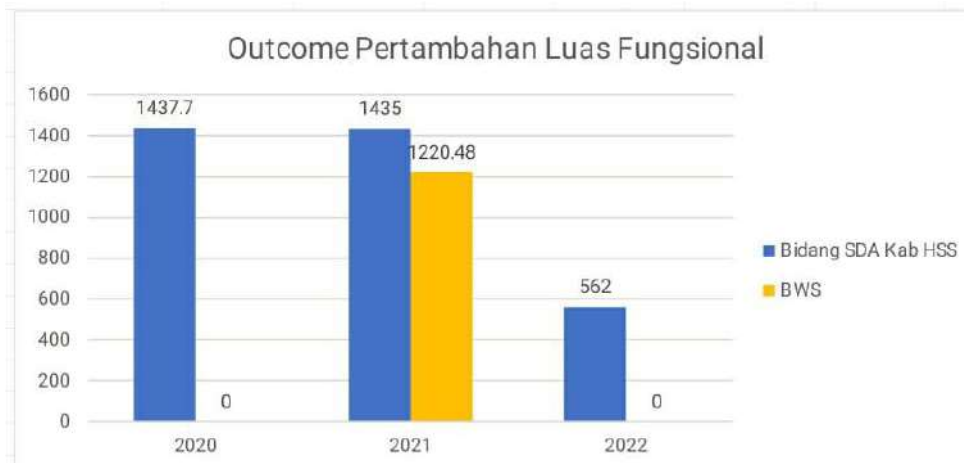
Pada tahun 2022 terdapat 12 Bendung dan 2.941 meter saluran sekunder dan tersier kewenangan kabupaten yang telah dilakukan Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, dimana terdapat penambahan 370 hektar luas fungsional jaringan irigasi yang telah mengalami perbaikan, sehingga kondisi bangunan irigasi menjadi lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan sebanyak 84 bangunan daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, dan masih terdapat 40 bangunan Daerah irigasi permukaan dengan kondisi bangunan Rusak sedang dan berat dari total jumlah 124 bangunan Daerah irigasi permukaan kewenangan Kab.HSS. Di sisi lain kondisi baik pada jaringan irigasi permukaan telah mencapai 9.384 hektar dari total luas Daerah irigasi permukaan 12.116 hektar. Sedangkan jumlah kondisi jaringan irigasi baik di daerah irigasi rawa 1.790 hektar dari total Luas Daerah irigasi rawa 3.740 hektar.

Harapannya dengan kondisi jaringan irigasi yang semakin baik dapat meningkatkan Indeks Pertanaman yang terdapat di berbagai kecamatan dan dapat meningkatkan Produksi Pertanian Kab.HSS Tahun 2022. Dimana pada tahun ini data dari Dinas Pertanian Kab.HSS telah terealisasi Panen 28.868 Hektar dengan angka Produksi 136.430 Ton.

Selain itu Sub kegiatan Normalisasi/restorasi sungai yang telah dikerjakan selama tahun ini telah banyak mendukung keberhasilan sistem irigasi untuk dapat menyalurkan air irigasi melalui saluran primer, sekunder sampai ke petak tersier. Ini dikarenakan menurut output yang telah terealisasi tahun ini sebanyak 76.744 meter sungai telah dilakukan pengerukan sedimentasi tanah/lumpur, raba, sampah sisa kayu/bambu yang menghambat aliran sungai tersebut, sudah dapat kembali lancar untuk mengairi lahan pertanian khususnya pada irigasi rawa yang ada di sungai bahalayung dan sungai taniran. Selain itu kegiatan Normalisasi sungai di Kecamatan Daha selatan, utara dan barat, dimana selain dapat memperlancar air untuk mengairi areal pertanian dan perkebunan juga berdampak pada lancarnya model transportasi air yang mana mayoritas menjadi keseharian masyarakat di Nagara.

Selain itu dampak keterlibatan Irigasi Kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III yaitu Daerah Irigasi Amandit dan Telaga langsung dalam pencapaian Produksi hasil Pertanian sangat membantu. Daerah Irigasi tersebut mengairi areal sawah di Kecamatan Padang batung, Sungai raya, Telaga langsung dan Angkinang. Harapan kami perlu dilakukan kerjasama dengan pihak BWS terkait pemeliharaan rutin dan Rehabilitasi Daerah irigasi Amandit dan Telaga langsung bahwa beberapa lokasi pintu air dan saluran sekunder yang masih rusak harus selalu dijaga kondisi bangunannya agar dapat selalu maksimal mengairi areal pertanian, sehingga dapat tercapai target Indeks pertanaman di kecamatan dan turut mendukung meningkatnya hasil Panen dan Produksi di Kab.HSS.

Berikut kami tampilkan grafik perbandingan penambahan Luas fungsional dan pembangunan jaringan irigasi dari Daerah Irigasi Amandit dengan Irigasi Kewenangan Kab.HSS periode 2020 sampai dengan 2022.



Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 telah terdapat 1 Daerah Irigasi Rawa yang mengalami Peningkatan jaringan irigasi yaitu DIR. Sungai Taniran. Dimana terdapat penambahan 192 ha luas fungsional jaringan irigasi yang telah mengalami peningkatan dan rehabilitasi dengan pembangunan pintu air dan normalisasi saluran pada jaringan irigasi rawa tersebut.

a). Perbandingan Realisasi Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi dengan Target Tahun pengukuran

Persentase kinerja sistem jaringan irigasi merupakan indikator sebagai tolak ukur mengetahui kondisi Infrastruktur irigasi, Sehingga semakin baik kondisi jaringan irigasi maka jumlah Luas fungsional sawah yang terairi makin bertambah dan bangunan

irigasi dengan kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten makin meningkat, dengan rumus perhitungan :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %

Berdasarkan data hasil survey E-PAKSI Tahun 2022, diketahui :

- Kondisi baik irigasi permukaan = 9.384 x 1,2 = 11.261 Ltr/Ha
- Kondisi baik irigasi rawa = 1.790 x 1,2 = 2.148 Ltr/Ha

Jadi Persentase kinerja sistem jaringan irigasi adalah :

$$= \frac{13.409}{19.027} \times 100 = 70,47 \%$$

Maka Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.9
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja
Sistem Jaringan Irigasi

Sasaran Strategis I : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi				
NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.2	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	69,10%	70,47%	101 %

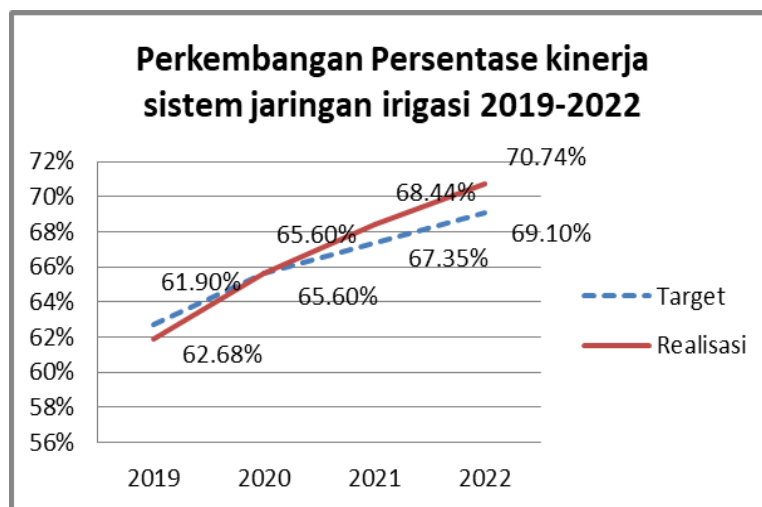
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi kinerja tahun 2022 sangat baik, ini dikarenakan realisasi capaian IKU tahun ini melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 70,47%, Sedangkan target tahun 2022 adalah sebesar 69,10% dengan capaian kinerja 101%.

Perhitungan Capaian dari hasil IKU tersebut yaitu hasil pembagian antara jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100%. Luas areal sawah yang baik pada tahun 2022 ini didapat dari hasil kegiatan dengan penanganan (rehab/peningkatan/pembangunan) pada daerah irigasi. Hasilnya jumlah kondisi baik pada irigasi permukaan telah mencapai 9.384

ha dari total luas Daerah irigasi permukaan 12.116 ha, Sedangkan jumlah kondisi baik luas daerah irigasi rawa 1.790 ha dari total Luas Daerah irigasi rawa 3.740 ha. Selanjutnya apabila dikonversikan dengan jumlah ketersediaan air irigasi total Luas hektar sawah dalam kondisi baik sebesar 13.409 L perdet/ha, dengan jumlah ketersediaan air irigasi pada Luas areal sawah yang menjadi kewenangan kabupaten sejumlah 19.027 L perdet/ha (irigasi permukaan dan rawa). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Capaian IKU presentase kinerja sistem jaringan irigasi Tahun 2022 telah melebihi Target yaitu sebesar 70,47%.

b). Perbandingan antara Capaian kinerja dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi presentase kinerja sistem jaringan irigasi dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada grafik berikut ini.



Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	62.68%	65.60%	67.35%	69.10%
Realisasi	61.90%	65.60%	68.44%	70.74%

Pada grafik di atas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentase kinerja sistem jaringan irigasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 telah tercapai 70,47%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 69,10%. Untuk mencapai

kinerja ini telah banyak di dukung dari pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi yang tertangani baik di Daerah irigasi permukaan maupun rawa sehingga dapat meningkatkan nilai kondisi baik pada bangunan irigasi kewenangan Kab.HSS.

c). Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan target akhir Renstra.

Renstra Dinas PUTR disusun untuk periode 2018-2023, maka pada tahun 2022 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke empat. Adapun realisasinya dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	70,47%	71,43%	98,68%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 70,47%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 (71,43%), maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2022 telah mencapai 98,68%. Dengan memperhatikan perkembangan capaian setiap tahun yang selalu meningkat, maka target pada akhir Renstra optimis akan dicapai dengan rencana aksi untuk melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi pada tahun 2023 melalui anggaran APBD dan berusaha memperoleh DAK bidang irigasi.

d). Perbandingan Capaian Kinerja Irigasi Kab.HSS dengan Capaian Provinsi Kalsel

Rumusan Indikator Kinerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan pada Bidang Sumber Daya Air berbeda dengan rumusan

indikator Kinerja pada Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun memiliki kesamaan obyek yaitu luas lahan fungsional. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Irigasi Dinas PUTR Kab.HSS dengan Dinas PUPR Prov.Kalsel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kab.HSS				
1	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	69,10%	70,47%	101 %
Bid. SDA Prov.Kalsel				
2	Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	49,70%	49,87%	100,35%

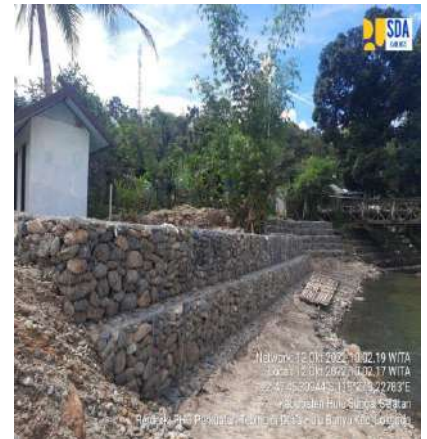
Pada tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas PUTR Kab.HSS dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan. Namun jika diperbandingkan angka realisasi persentasenya lebih tinggi capaian Dinas PUTR Kab.HSS. Hal ini karena rumusan indikator yang digunakanm berbeda.

e). Program dan Kegiatan serta Capaian output dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama

Penunjang tercapainya indikator Presentase kinerja sistem irigasi dengan capaian realisasi sebesar 70,47%, yaitu dengan terealisasi beberapa pekerjaan konstruksi pada Bidang Sumber Daya Air. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1). Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan pagu anggaran Rp.3.702.570.000- pada kegiatan ini telah terlaksana pekerjaan Pembangunan perkuatan tebing dengan pemasangan bronjong di berbagai wilayah Kab.HSS dengan panjang konstruksi 375 meter, yang mana output dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk melindungi longsor pada permukiman penduduk yang berada di sekitar bantaran sungai. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini yaitu Rp.3.578.881.013,- dengan presentase realisasi keuangan 96,66% dan realisasi fisik 101%.



Perkuatan tebing di
Desa Hulu Banyu
Kec. Loksado

- b. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan pagu anggaran Rp. 13.142.812.500,-. Pada Sub kegiatan ini merupakan salah satu yang paling banyak paket pekerjaan, dikarenakan manfaat dari hasil pekerjaan normalisasi sungai selain sebagai penyuplai utama air irigasi pada areal pertanian, juga sebagai model transportasi warga, khususnya di wilayah Nagara (Kec.Daha Selatan, Daha utara serta Daha barat). Realisasi pelaksanaan pekerjaan Normalisasi/Restorasi Sungai Tahun 2022 sepanjang 76.744 meter, Realisasi ini melebihi target awal yaitu 74.921 meter. Beberapa paket pekerjaan Normalisasi sungai ada yang batal dikerjakan. Ini dikarenakan ada berbagai permasalahan di lapangan yang tidak bisa dihindari dikarenakan faktor dari alam yaitu tinggi dan rendahnya muka air sungai yang dipengaruhi dari keadaan dan lokasi sungai tersebut, sehingga tidak memungkinkan alat untuk masuk ke lokasi pekerjaan. Realisasi Keuangan Normalisasi/Restorasi Sungai sebesar Rp. 11.774.340.324,- dengan presentase realisasi keuangan 89,59% dan realisasi fisik 102,4%.



Normalisasi/
Restorasi Sungai
Bahalayang Desa
Lungau
Kec.Kandangan

- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp.45.712.500,-. Manfaat dengan dilaksanakan kegiatan ini yaitu memberikan edukasi kepada 20 orang para kelompok P3A, Sehingga memahami peran serta terhadap pengelolaan saluran irigasi. Selain itu terdapat kegiatan Sidang Komisi Irigasi yang hanya dapat terlaksana 1 kali dari 2 kali sidang yang ditargetkan karena kendala kesibukan masing-masing anggota komir. Realisasi anggaran sebesar Rp.29.487.500,- dengan presentase realisasi keuangan 64,51%.

2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan pagu Rp.50.000.000,-. Dokumen Perencanaan yang terealisasi yaitu Perencanaan pekerjaan Pemeliharaan pada Daerah irigasi permukaan yang sesuai kewenangan Kab.HSS.

- b. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan pagu Rp. 1.125.785.000,-. Pada kegiatan ini telah dilakukan pembangunan beberapa saluran sekunder dan tersier agar air bisa sampai ke petak sawah, sehingga dapat meningkatkan Indeks pertanaman di areal sawah tersebut. Kegiatan ini telah terealisasi pembangunan saluran sekunder dan tersier sepanjang 1.116 meter. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.1.106.267.600,- dengan



Pembangunan
Saluran tersier di

presentase realisasi keuangan 98,27% dan realisasi fisik 140%.

Desa Karang jawa

- c. Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi dengan anggaran Rp. 252.300.000,- Pada Sub kegiatan ini hanya terdapat 1 pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan Bendung DI.Jarum di desa Bumi berkat Kec.Sungai Raya. Dimana pembangunan bendung ini menghasilkan output 23 Ha sebagai luas fungsional sawah, sehingga menambah luasan sawah yang dapat terairi irigasi. Realisasi anggaran Rp. 251.490.000,- dengan persentase realisasi keuangan 99,68% dan realisasi fisik 100%.



Peningkatan Daerah Irigasi rawa Sungai Taniran

- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan pagu anggaran Rp.8.896.725.985., yang mana Pada Sub kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Permukaan dan Peningkatan irigasi Rawa yang bersumber dari Dana APBD II maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PUPR Bidang Irigasi. Hasil dari kegiatan ini bangunan Irigasi permukaan dan rawa yang mengalami kerusakan telah berubah kondisi yang sebelumnya rusak sedang/berat menjadi kondisi baik. Ada 11 bangunan irigasi permukaan yang dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi jaringan dan 1 buah peningkatan irigasi rawa, dampaknya kondisi bangunan pada saluran primer dan sekunder menjadi baik. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.8.788.598.850,- dengan presentase realisasi keuangan 99,10% dan realisasi fisik 100%.



Rehabilitasi DI.Pamujaan (DAK Penugasan)

- e. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan anggaran Rp.627.750.000,-. Pada Sub

kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Pemeliharaan beberapa Daerah irigasi permukaan yang terdapat di 4 Kecamatan. Manfaat dari pekerjaan pemeliharaan ini yaitu untuk mempertahankan umur bangunan Bendung dan saluran irigasi dengan merawat/memelihara bangunan irigasi. Kegiatan ini telah terealisasi pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 4.153 meter. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.619.436.000,- dengan presentase realisasi keuangan 98,68% dan realisasi fisik 100%.

- f. Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi dengan anggaran Rp.230.940.000,-. Pada Sub kegiatan ini terdapat gaji tenaga teknis pengelola irigasi di masing-masing kecamatan dan iuran untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Bidang Sumber Daya Air sebanyak 9 orang. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.207.823.200,- dengan presentase realisasi keuangan 89,99% dan realisasi fisik 100%.

f). Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Pencapaian Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi.

Berdasarkan Target dan Realisasi pada pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Sumber Daya Air Tahun 2022 Target IKU 69,10% telah terealisasi sebesar 70,47% yang mana melebihi dari target yang telah ditentukan pada tahun ini, sehingga capaian kinerja dapat digolongkan sangat baik sekali.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa hal, antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun;
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
3. Terlaksananya secara maksimal beberapa pekerjaan konstruksi dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air khususnya Kegiatan Rehabilitasi bendung irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan total kondisi hektar sawah yang baik, Sehingga Rasio Bangunan irigasi permukaan dan rawa di Kab.HSS mengalami

peningkatan sebesar 13.409 Ha dari total jumlah luas areal 19.027 Ha.

4. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, SKPD lain, Pemerintah Provinsi Kalsel maupun Program-Program kegiatan yang dibiayai oleh DAK Penugasan Bidang Irigasi.

Adapun penyebab kegagalan untuk dapat tercapainya target IKU memang tidak ada, akan tetapi terdapat beberapa paket pekerjaan di sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai yang tidak bisa dikerjakan dikarenakan dalam kondisi Kahar. Kegiatan ini tidak mendukung secara langsung target pada indikator kinerja utama jadi tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Pekerjaan Normalisasi yang batal dikerjakan tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi berdampak pada meluapnya permukaan air pada sungai. Khususnya pada wilayah kecamatan Kalumpang dikarenakan beberapa wilayah hilirnya terdapat sumbatan tanaman, raba dan sampah, sehingga aliran sungai tidak normal lagi, sehingga air sungai sulit untuk mengalir ke daerah hilir. Dampaknya tanggul sungai tidak kelihatan (tenggelam) sehingga menyebabkan Exavator tidak memungkinkan untuk dioperasikan lagi. Solusi untuk ke depannya melakukan koordinasi dengan pihak penyedia dan konsultan terkait percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menghindari naiknya permukaan air pada saat musim hujan, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

g). Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Anggaran merupakan hasil dari artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi kinerja} = \left(\frac{\text{Capaian kinerja (\%)}}{\text{Realisasi Anggaran (\%)}} \times 100\% \right)$$

Jumlah Pagu Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air tahun 2022 yaitu Rp. **28.468.965.958,-** dan terealisasi sebesar Rp. **26.798.598.137,-**. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi kinerja pada level program yaitu 74,86% dan Kegiatan 68,45%.

IKU 1.3 : Persentase bangunan gedung yang laik fungsi

Untuk memberikan kepuasan pelayanan masyarakat, salah satunya yaitu perlu adanya ketersediaan, sarana dan prasarana publik yang dapat berfungsi dengan baik.

Di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini termuat pada misi III dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, dimana salah satu indikator kinerja pengukuran keberhasilannya yaitu Persentase bangunan gedung yang laik fungsi. Yang dimaksud disini adalah kecukupan kebutuhan Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik,

dengan target tahun 2022 sebesar 85,71%. Dinas PUTR merupakan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab untuk mencapai kinerja tersebut sesuai dengan tugas pokoknya. . Maka Indikator kinerja ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas PUTR dengan target kinerja yang sama sebagaimana di dalam RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut.

Pada tahun 2022 merupakan momen bersejarah bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov Kalimantan Selatan. Untuk itu Dinas PUTR mempunyai tugas untuk penyediaan sarana prasarana/venue cabnag olah raga yang diperlombakan pada pelaksanaan Porprov tersebut.

a). Perbandingan Antara Realisi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja yang Telah Ditetapkan.

Sampai dengan pelaksanaan tahun lalu sudah terbangun 14 bangunan strategis , dan pada tahun 2022 ditargetkan akan dibangun 4 buah bangunan yang cukup strategis khususnya penyiapan venue pelaksanaan Porprov. Kalsel , yaitu

1. Pembangunan lapangan volley in door 2 Desember
2. Pembangunan lapangan sepak takraw semi in door
3. Pembangunan gedung futsall di Kecamatan Loksado
4. Rehabilitasi stadion HM Syafi'i

Dengan demikian sampai dengan pelaksanaan Renstra tahun ketiga pada tahun 2022 ini, telah terbangun sebanyak 18 buah bangunan publik sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai rumus Perhitungannya,

Jumlah Bangunan Publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan X 100%
--

maka Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik :

$$= \frac{18 \text{ Buah}}{\text{Total}} \times 100\% = 85,71 \%$$

21 Buah

Capaian realisasi dengan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.:

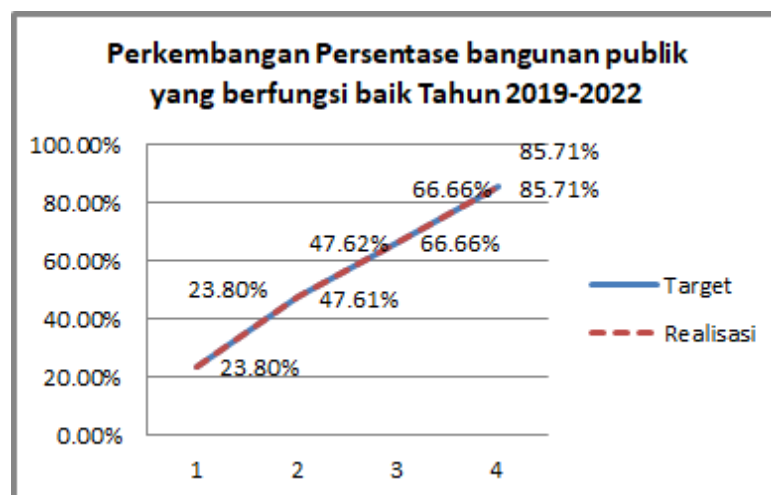
Tabel 3.12
Capaian IKU Persentase bangunan gedung yang laik fungsi

Sasaran Strategis I : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi				
NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.3	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	85,71 %	85,71%	100 %

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kecukupan sarana prasarana publik telah tercapai.

b). Perbandingan Antara Realisi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun yang Lalu.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana publik selalu ada pada sasaran strategis 2018-2023, demikian juga halnya pada RPJMD periode 2013-2018, namun dengan jumlah kebutuhan yang berbeda targetnya. Hal ini dapat dilihat dari data beberapa tahun terakhir pada grafik berikut ini.



Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	0.81	0.83	0.83	0.87
Realisasi	0.81	0.82	0.84	0.85

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi Persentase bangunan gedung yang laik fungsi mengalami peningkatan pada periode Renstra dari tahun 2019 sampai 2023.

c). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Target Kinerja pada Akhir Renstra Tahun 2023

Pada akhir pelaksanaan Renstra ditargetkan Persentase bangunan publik yang berfungsi baik sebesar 100 %. Maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka capaiannya terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022
terhadap Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Capaian %
1	2	3	4
Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	85,71%	100%	85,71 %

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2022 belum mencapai target pada akhir tahun Renstra, namun target tersebut optimis akan dicapai pada tahun 2023.

d). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Tingkat Provinsi dan Nasional

Indikator persentase bangunan publik yang berfungsi baik merupakan indikator kinerja pada Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan dan tidak ada dalam indikator tingkat provinsi dan nasional, maka datanya tidak bisa diperbandingkan.

e). Analisis Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Tercapaiannya Keberhasilan dan Permasalahan yang Menghambat Pencapaian Kinerja

Kinerja penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2022 telah berhasil membangun bangunan publik sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini karena adanya ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut melalui program dan kegiatan, yaitu :

- Program **Program Penataan Bangunan Gedung melalui Kegiatan** Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (DAU & DAK)



Pembangunan Lapangan Volly indoor



Pembangunan lapangan takraw semi indoor



Pembangunan Lapangan football Kec. Loksado



Rehabilitasi stadion HM. Syafi'i

Disamping 4 bangunan strategis tersebut di atas, juga dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi beberapa bangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mal Pelayanan Publik
2. Peningkatan Gedung Serbaguna 2 Desember
3. Peningkatan Kantor Sekretariat MUI Kab. HSS
4. Pembuatan Ruang Pelayanan Publik Dinas PUTR Kab. HSS
5. Rehabilitasi Mushola dan Toilet Gedung Serbaguna Kec. Padang Batung
6. Pembangunan Mesjid di Kawasan Islamic Center Tahap III (Multiyears)
7. Pembangunan Lapangan Balap Sepeda Malutu (Lanjutan)
8. Peningkatan Halaman dan Parkir Dinas PUTR Kab. HSS
9. Peningkatan Halaman Polres HSS (Lanjutan)
10. Rehabilitasi Polsubsektor Daha Barat

f). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Target Kinerja

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yaitu ketersediaan anggaran. Adapun anggaran yang telah digunakan dan direalisasikan, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program Penataan Bangunan tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	22.603.506.000	21.219.944.961	93,88	100
	1. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	158.894.000	124.141.820	78,13	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (DAU & DAK)	22.444.612.000	21.095.803.141	93,99	97,96

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan ada yang belum mencapai 100 %. Hal ini Karena kondisi kondisi cuaca yang menghambat penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai sampai batas waktu kontrak.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	
Indikator Kinerja	2.1 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
	2.2 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman

Ketersediaan air bersih dan sanitasi berupa sarana buang air besar merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. air bersih dibutuhkan masyarakat untuk sumber air minum, mandi, mencuci dan lain-lain. Namun demikian sampai saat ini belum semua penduduk terpenuhi akses air bersih, maka harus ditingkatkan tiap tahun karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelahiran anak stunting dan kemiskinan.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut Ini



Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sehingga dengan adanya intervensi program dari Pemerintah Daerah salah satunya dengan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi diharapkan angka kemiskinan dapat selalu ditekan.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Terdapat beberapa faktor penyebab *stunting*, salah satunya faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko *stunting* pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat memengaruhi pertumbuhannya. Adapun perkembangan Balita *Stunting* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Perkembangan angka balita stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5(lima) tahun terakhir berhasil ditekan sehingga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun demikian upaya penurunan angka stunting akan terus diupayakan karena berpengaruh terhadap masa depan generasi yang akan datang. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih layak dan sanitasi layak.

IKU 2.1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak dipilih sebagai indikator kinerja karena merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten.

Air bersih layak adalah air bersih yang bersumber dari air dalam jaringan perpipaan dan air permukaan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi dan layak digunakan sebagai sumber air minum setelah dilakukan pengolahan. Adapun untuk memperoleh nilai tersebut dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rumah} & & & \text{Jumlah KK yang mendapatkan akses air} \\
 \text{tangga yang} & = & & \text{minum yang layak} \\
 \text{mendapatkan akses} & & & \\
 \text{air minum layak} & & & \hline
 & & & \text{Jumlah KK se Kab. HSS}
 \end{aligned}$$

a). Perbandingan Antara Realisi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak Tahun 2022 dengan Target Kinerja yang Telah Ditetapkan.

Jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih sampai dengan tahun lalu sebanyak 52.223 KK dan untuk meningkatkan akses air bersih maka pada tahun 2022 Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana air bersih dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki balita stunting. Pada wilayah yang telah tersedia jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dilaksanakan pemasangan sambungan ke rumah penduduk (SR). Sedangkan pada wilayah yang belum ada jaringan perpipaan dilakukan pembangunan menara air dan sambungan ke rumah penduduk dengan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 1.062 KK. Dengan demikian sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih berjumlah 48.979 KK atau jika dibandingkan dengan jumlah KK se Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai persentase sebagai berikut :

$$\frac{48.979 \text{ KK}}{56.296 \text{ KK}} = 87,01\%$$

$$56.296 \text{ KK}$$

Dengan demikian Capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak

Sasaran Strategis II :				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	85%	87,01%	102,36%

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan pokok air minum telah mencapai target. Namun demikian hal ini perlu kerja keras, karena sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air minum membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Sebagai rencana aksi ke depan akan diupayakan dengan melaksanakan program SPAM perdesaan untuk menjangkau rumah tangga yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum yang dikelola PDAM.

Sumber air bersih masyarakat berasal dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti air sumur dalam, penampungan mata air. Adapun sebaran jumlah KK yang telah memiliki akses sarana air bersih layak per wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16

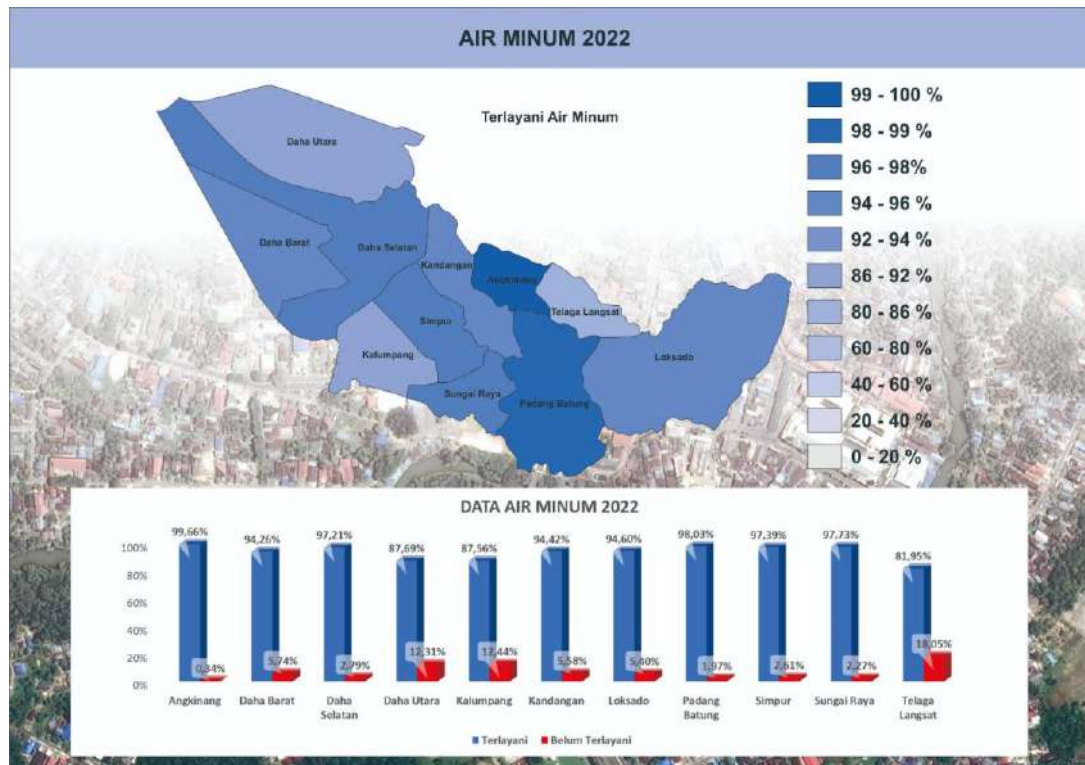
**Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Terlayanai JP Unit Rumah	Terlayanai BJP Unit Rumah
1	2	3	4
1	Angkinang	4446	761
2	Daha Barat	1218	63
3	Daha Selatan	6787	1372
4	Daha Utara	3865	1343
5	Kalumpang	981	743
6	Kandangan	9006	3809
7	Loksado	1028	1161
8	Padang Batung	3563	2204
9	Simpur	3032	994
10	Sungai Raya	3203	1481
11	Telaga Langsung	1573	652
Jumlah		38,702	10.277
Total Keseluruhan			48.979 KK
Jumlah KK se Kab.HSS			56.296 KK
Persentase			87,01%

Keterangan :

JP : Jaringan Perpipaan ; BJP : Bukan Jaringan Perpipaan

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sumber air bersih melalui jaringan perpipaan, namun sebagian bersumber pada bukan jaringan perpipaan tapi dari sumber lain yang terlindungi, umumnya. Adapun sebaran capaian perwilayah kecamatan lebih jelas dapat dilihat pada peta wilayah dibawah ini.

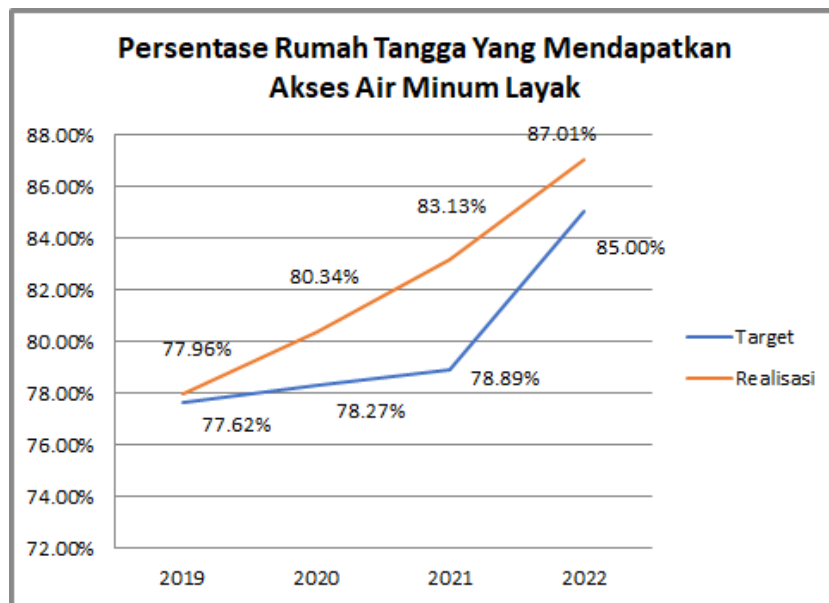


Pada peta di atas untuk wilayah kecamatan dengan warna biru semakin tua menunjukkan akses masyarakat terhadap air bersih sebagai sumber air minum semakin besar.

Pada tahun 2022 terdapat 24 rumah tangga sasaran penerima program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum akses air bersih dari keluarga yang memiliki bayi stunting. Dan belum memiliki akses sarana air bersih layak. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUTR juga berkontribusi untuk penanganan keluarga stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b). Perbandingan Realisi Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses sarana air minum layak Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Sebelumnya.

Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini disajikan perkembangan data realisasi dan target kinerja akses air bersih tahun 2019-2022 yang terlihat pada grafik berikut ini.



Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	77,62%	78,27%	78,89%	85,00%
Realisasi	77,96%	80,34%	83,13%	87,01%

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari pada tahun sebelumnya. Hal ini Karena tahun 2022 adalah pasca pandemic covid-19 sehingga anggaran bisa digunakan untuk pembangunan fisik.

c). Perbandingan Antara Realisi Kumulatif persentase rumah tangga yang memiliki akses sarana air minum layak Tahun ini dengan Target Akhir Renstra.

Sasaran strategis Dinas PUTR disusun sesuai periode RPJMD kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 2018-2023. Maka upaya untuk mencapai target kinerja setiap tahun dalam rangka mencapai periode akhir Renstra yaitu tahun 2023 dan diharapkan pada akhir periode Renstra pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan mencapai 100%. Adapun perbandingannya dengan realisasi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sarana air minum layak	87,01%	90%	96,67 %

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini belum tercapai target kinerja akhir periode Renstra, namun demikian karena masih adanya 1 (satu) tahun lagi maka optimis untuk dicapai dengan melakukan beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain :

- 1). Terus mengupayakan mencari sumber pembiayaan melalui DAK bidang air minum dan program hibah pemerintah pusat untuk memperluas jaringan perpipaan maupun membangun system pengolahan air minum (SPAM) perdesaan.
- 2). Mengajukan usulan rencana kegiatan anggaran (RKA) tahun 2023 melalui anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

d). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel dan Nasional

Pemenuhan air minum bagi masyarakat merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah setiap level baik pusat, provinsi dan kabupaten. Maka dapat disandingkan dengan capaiannya dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalsel dan Nasional. Berikut ini disajikan realisasi di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dibandingkan dengan kabupaten kota di Kalimantan Selatan dalam bentuk persentase yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Realisasi akses masyarakat terhadap sarana air bersih
Kabupaten/Kota di Kalsel Tahun 2022

No	Kabupaten Kota	Realisasi
1	2	3
1	Kabupaten Tanah Laut	100%
2	Kabupaten Banjar	100%
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	97,43%
4	Kabupaten Kotabaru	95,34%
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87,01%
6	Kabupaten Tabalong	86,81%
7	Kabupaten Balangan	84,05
8	Kabupaten Tanah Bumbu	82,65%
9	Kabupaten Tapin	70,14%
10	Kabupaten Batola	66,47%

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi pemenuhan air minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 termasuk tinggi dari beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun perbandingan dengan realisasi capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Perbandingan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Air Bersih
di HSS dengan Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian HSS	Capaian Prov. Kalsel	Capaian Nasional
1	2	3	4	5
1	Persentase Akses Sarana Air Bersih	87,01%	88,68%	91,05%

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian akses air bersih di Hulu Sungai Selatan masih dibawar rata-rata tingkat Provinsi Kalsel dan nasional.

e). Analisis Data Program/Kegiatan Penunjang Tercapaiannya Keberhasilan dan Permasalahan yang Menghambat Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUTR Tahun 2022 melalui Bidang Cipta Karya dalam penyediaan air bersih yang dilaksanakan tersebar di desa dan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2022 melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Perdesaan pada Desa Samuda Kec. Daha Selatan dan Desa Hulu Banyu Kec. Loksado serta rehabilitasi SPAM pada Mesjid Khusnul Khatimah Desa Sungai Paring Kec. Simpur.



2. Pembangunan SPAM pada Pongpes Al Baladul Amin Kec. Telaga Langsat, Pongpes Assofa Kec. Kandangan, Pongpes An Nur Putra dan Putri Desa Sungai Pinang Kec. Dh Selatan,



Pembangunan SPAM Perdesaan berupa bangunan menara air

3. Perluasan SPAM Desa Durian Rabung, Desa Mawangi, Desa Tabihi kec. Padang Batung, Desa Panggungan dan Desa Hulu Banyu Kec. Loksado, Desa Mandala Murung Mesjid Kec. Daha Utara, Desa Bumi Berkat dan Desa Asam Kec. Sungai Raya, Desa pantai Ulun Kec. Simpur, Desa Banua Hanyar Kec. Daha Selatan, serta Desa Badaun Kec. Daha Barat.



Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Reguler) pada Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat, Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang, Desa Gambah Luar Muka Kec. Kandangan, Desa Panjampang Bahagia Kec. Simpur,



Pemasangan Jaringan Perpipaan

5. Pembangunan SPAM melalui Program Pamsimas Desa Tanjung Selor Kec. Daha Barat, Desa Samuda dan Desa Banua Hanyar Kec. Angkinang, Desa Sungai Garuda Kec. Daha Utara dan Desa Malutu Kec. Padang Batung.



Sosialisasi PHBS Program Pamsimas

Permasalahan pencapaian Rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air bersih membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan.

Untuk memperluas akses air bersih akan selalu diupayakan untuk memperoleh sumber pendanaan disamping dari APBD melalui DAU juga usulan kegiatan DAK.

f). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Target Kinerja

Anggaran merupakan hasil dari artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi kinerja} = \left(\frac{\text{Capaian kinerja (\%)}}{\text{Realisasi Anggaran (\%)}} \times 100\% \right)$$

Sebagai dasar perhitungan efisiensi sumber daya biaya yang digunakan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap sarana air bersih layak tahun 2022 berikut ini disajikan realisasi fisik dan serapan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan untuk Meningkatkan rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.917.191.036	11.863.659.705	99,55	100
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAU & DAK)	11.517.905.464	11.465.923.813	99,55	100
	2. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	399.285.572	397.735.893	99,61	100

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi fisik kegiatan dan program pengelolaan dan pengembangan SPAM telah mencapai 100%. Namun demikian tidak semua anggaran habis terserap karena adanya penghematan sebesar 0,45%.

IKU 2.2 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyediaan pelayanan sanitasi dasar juga merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan pada akhirnya diharapkan semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar yang layak khususnya sarana prasarana buang air besar. Penuntasan masyarakat untuk tidak buang air sembarangan (BABS) sangat penting dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan desa yang memiliki sertifikat ODF (*open defecation free*). Sampai dengan tahun 2022, beberapa Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sertifikat ODF. Hal ini dapat dilihat pada data tabel di bawah ini.

Tabel. 3.21
Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa ODF	Desa belum ODF	Jumlah Desa/Kel
1	Kec. Angkinang	6	5	11
2	Kec. Daha Barat	-	7	7
3	Kec. Dh Selatan	2	14	16
4	Kec. Daha Utara	2	17	19
5	Kec. Kalumpang	6	3	9
6	Kec. Kandangan	12	8	20
7	Kec. Loksado	1	10	11
8	Kec. Padang Batung	11	6	17
9	Kec. Simpur	11	-	11
10	Kec. Sungai Raya	3	13	16
11	Kec. Telaga Langsat	8	3	11
Jumlah		62	86	148

Jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bebas BABS sampai dengan tahun 2022 sebanyak 62 Desa, namun lebih banyak Desa yang belum bebas BABS yaitu sebanyak 86 Desa/Kalurahan. Hal ini disebabkan disamping karena keterbatasan sarana BAB juga untuk merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan perlu waktu khususnya masyarakat yang tinggal

dekat dengan bantaran sungai dimana sampai tahun 2021 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 47.085 KK.

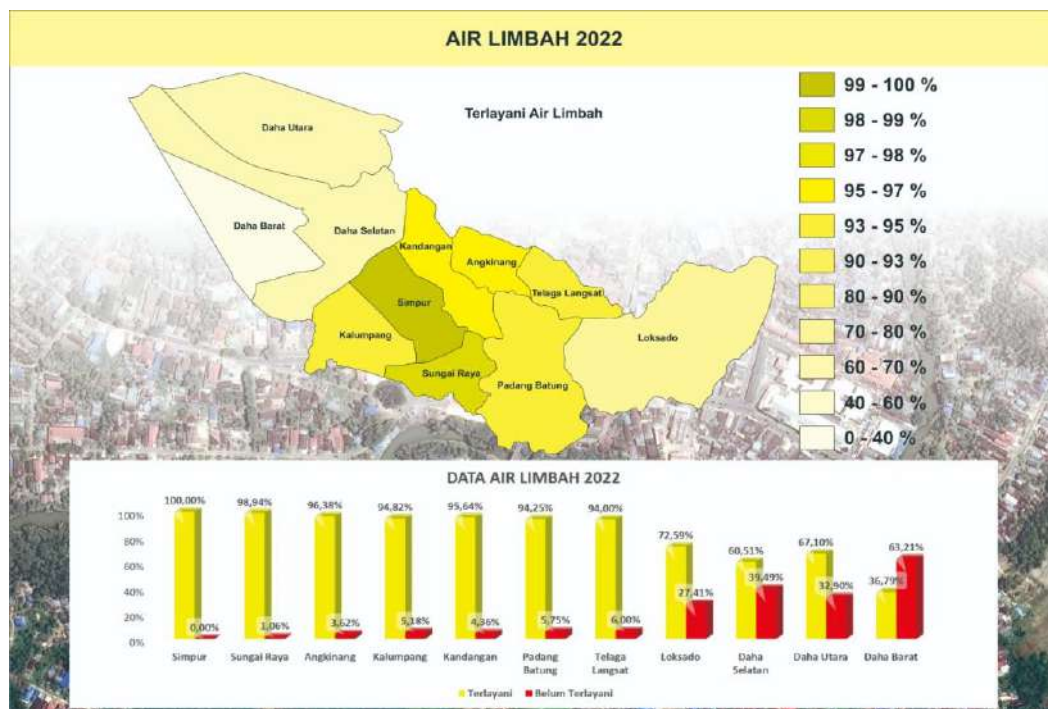
Dinas PUTR secara terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan WC masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah baik melalui anggaran APBD maupun DAK yang pada tahun 2022 sebanyak 758 KK, sehingga keseluruhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 48.100 KK.

Maka persentase penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terlayani sanitasi dasar Tahun 2022 diperoleh dengan Perhitungan:

Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab.HSS

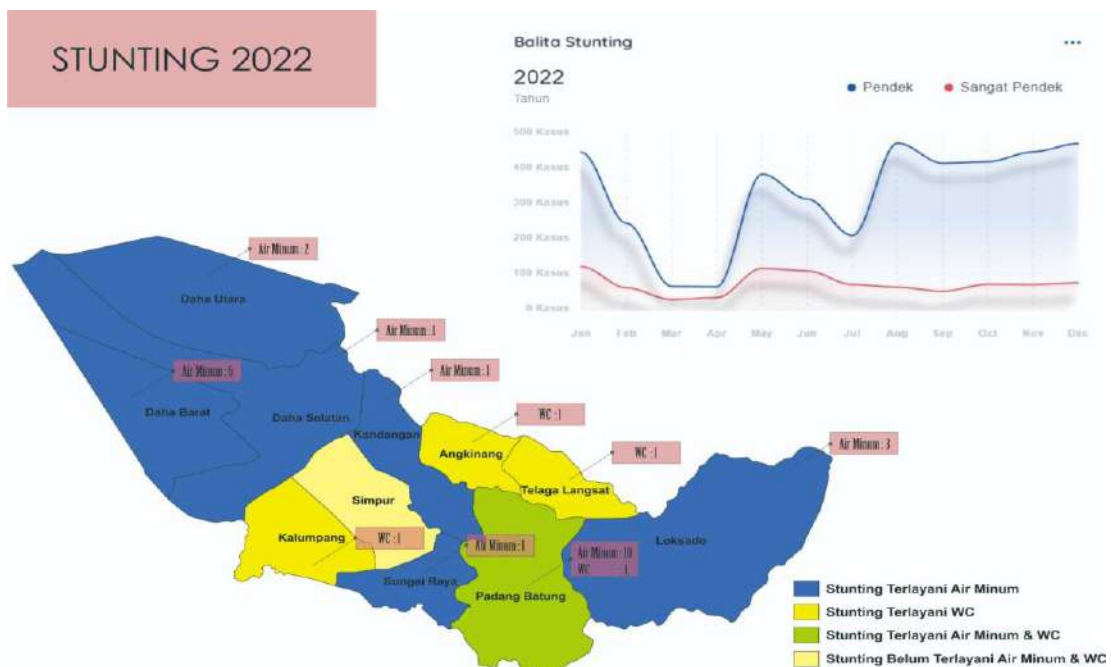
$$= \frac{48.100\text{KK}}{56.296 \text{ KK}} = 85,44\%$$

Adapun sebaran akses sanitasi per wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Pada peta di atas menunjukkan wilayah Kecamatan dengan warna lebih tua masyarakatnya memiliki akses sanitasi lebih tinggi dari pada warna yang lebih muda, dimana Kecamatan Simpurn tercatat memiliki akses sanitasi paling tinggi sedangkn yang terendah pada wilayah Kecamatan Daha Barat. Hal ini terjadi karena masih adanya tradisi kebiasaan masyarakat untuk buang air besar di sungai.

Selain dalam pemenuhan dasar akses sanitasi, juga mendukung dalam penurunan stunting dengan capaian sebagai berikut :



a). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja yang Telah Ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian kinerja Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, berikut ini disajikan realisasi dan target kinerja.

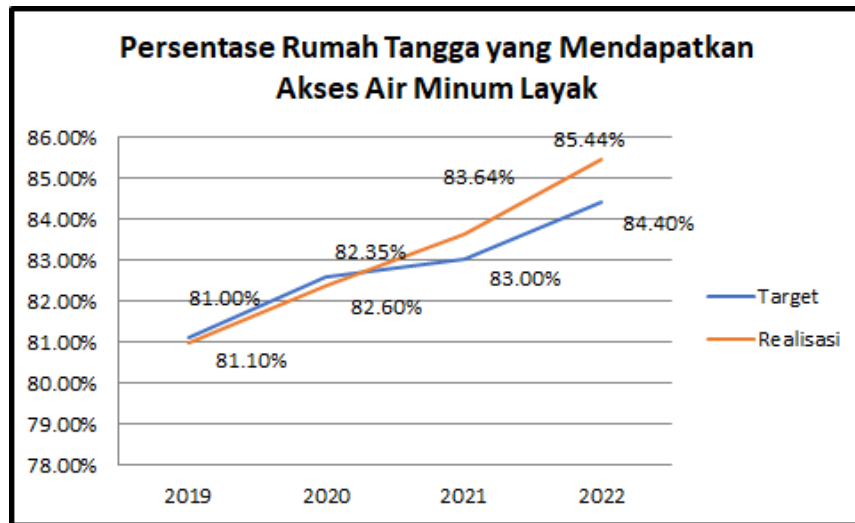
Tabel 3.22
Capaian IKU Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman Tahun 2022

Sasaran Strategis II :				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	84,40%	85,44%	101,20%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi realisasi kinerja atas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian dalam mencapai target tersebut cukup berat. Hal ini karena adanya kebiasaan turun menurun masyarakat khususnya yang tinggal dibantaran sungai amandit dan Negara yang buang air di sungai. Hal ini akan menjadi perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan sanitasi masyarakat yang layak. Adapun rencana aksi ke depan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat (PHBS).

b). Perbandingan Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman Tahun ini dengan Beberapa Tahun sebelumnya.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Maka setiap tahun Dinas PUTR berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Adapun realisasi capaian beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat perkembangannya dalam grafik berikut ini.



Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	81,1%	82,6%	83,00%	84,40%
Realisasi	81.00%	82.35%	83.64%	85.44%

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan capaian Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman mulai tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

c). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Target Kinerja pada Akhir Renstra Tahun 2023

Sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, maka pada akhir Renstra penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ditargetkan tercapai 90 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Target Kinerja pada Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	85,44%	85,90%	99,44%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa target kinerja pada akhir pelaksanaan Renstra belum bisa dicapai pada tahun 2022 ini dengan selisih 0,48%. Namun demikian optimis hal ini akan dicapai jika ada dukungan anggaran yang cukup untuk mewujudkan sisa target kinerja yang harus dicapai.

d). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel

Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah setiap level baik pusat, provinsi dan kabupaten. Berikut ini disajikan realisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan dengan kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.24
Realisasi akses masyarakat terhadap sarana sanitasi
Kabupaten/Kota di Kalsel Tahun 2022

No	Kabupaten Kota	Realisasi
1	2	3
1	Kabupaten Tanah Laut	100%
2	Kabupaten Banjar	100%
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	100%
4	Kabupaten Balangan	98,85%
5	Kabupaten Tabalong	90,86%
6	Kabupaten Tapin	88,08%
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	85,44%
8	Kabupaten Kotabaru	77,93%
9	Kabupaten Tanah Bumbu	72,71%
10	Kabupaten Batola	78,61%

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi pemenuhan sarana sanitasi layak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sedang dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan .

Adapun perbandingan dengan realisasi capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisaasi akses masyarakat terhadap akses sarana sanitasi layak di HSS dengan Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian HSS	Capaian Prov. Kalsel	Capaian Nasional
1	2	3	4	5
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	85,44 %	88,28%	80,92%

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian akses sanitasi layak di Hulu Sungai Selatan masih dibawah capaian tingkat Provinsi Kalsel, namun lebih tinggi daripada capaian tingkat nasional

e). Analisis Program dan Kegiatan untuk mencapai Kinerja dan Permasalahan yang Menghambat Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja akses sarana sanitasi layak, dilaksanakan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah melalui Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dalam bentuk sebagai berikut

- a. Pembangunan SPALD JAGAT (Jamban Keluarga Sehat) pada Desa Mawangi Kec. Padang Batung, Desa Bangkau Kec. Kandangan, Desa Tajung Selor Kec. Daha Barat, Desa Tambangan Kec. Daha Selatan, Desa Kayu Abang Kec. Angkinang, Desa Kamawakan dan Haratai Kec. Loksado, , Desa Hamak Utara Kec. Telaga Langsat.



Jamban Keluarga Desa Mawangi

- b. Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Reguler) Desa Amparaya dan Desa Pajampang Bahagia Kecamatan Simpur, Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan, Desa Lokbinuang Kec Telaga Langsung,



Septik tank Desa Panjampang Bahagia

- c. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10) KK (DAK Reguler) Desa Bajayau Tengah dan Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat, Desa Baruh Jaya dan Desa Samuda Kec. Daha Selatan, Desa Batu Bini Kec. Padang Batung, Desa Hamayung Kec. Daha Utara, Desa Karang Paci Kec. Kalumpang, Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang,



Pembangunan IPALD Desa Karang Paci

- d. Pembangunan SPALD BBM (Bersuci, Berwudhu, Mandi) Ponpes Dalam Pagar Putri II, Ponpes Darul Ulum Desa Amawang Kiri dan Ponpes Dalam Pagar Putra, dan Mesjid Raudhatul Muslimin Parincahan, Kec. Kandangan, Kawasan Religi Kapuh Kec. Simpur, Ponpes Ibnu Mas'ud Kec. Sungai Raya , Ponpes Babussalam Kec. Padang Batung,



Pembangunan SPALD BBM

- e. Program Gebrak Sehati (Gerakan Pembangunan Bersama Berkelanjutan Seribu Sarana Sanitasi dan Air Minum Sehat) Lokasi Kec. Kandangan, Angkinang, Sungai Raya, Kalumpang, Padang Batung, Loksado, Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat.

Capaian kinerja akses masyarakat terhadap sarana sanitasi layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah sebesar 97,77 % dari target atau masih dibawah target yang ditetapkan. Permasalahan yang sering ditemui di lapangan yaitu kesadaran

masyarakat untuk hidup sehat dengan merubah kebiasaan tidak buang air sembarangan masih kurang, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang terbiasa dengan buang air besar di jamban langsung ke sungai. Disamping itu juga adanya keterbatasan anggaran untuk menyediakan septik yang memenuhi standar untuk buang air besar.

f). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Target Kinerja

Salah satu sumber daya yang digunakan untuk mencapai kinerja yaitu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut ini disajikan realisasi fisik dan penyerapan anggaran program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja akses sanitasi layak.

Tabel 3.26
Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Penunjang Capaian Kinerja akses sarana sanitasi layak Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.008.749.000	10.973.683.040	99,68	100
	1. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (DAU & DAK)	10.560.609.000	10.547.622.800	99,88	100
	2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	448.140.000	426.060.240	95,07	100

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah terealisasi 100%, namun penyerapan keuangan sebesar 99,68 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,02%.

Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Penggunaan Tata Ruang Sesuai dengan Peruntukannya

Indikator Kinerja	3.1 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang
--------------------------	---

Pengaturan penggunaan pola ruang yang tertib akan mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan regulasi yang mengatur mengatur rencana tata ruang dan lebih spesifik dalam rencana detail tata ruang, akan mempermudah dalam peningkatan investasi daerah.

IKU 3.1 : Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang

Sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan dalam Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 capaian kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang adalah 94% dan harus terpenuhi tahun 2022.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang sesuai dengan IKU dilakukan dengan perhitungan, sebagai berikut :
= *Jumlah persentase 50% Pemenuhan Regulasi penataan ruang dan 50% Pemenuhan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang*

Regulasi Penataan Ruang	50%
Pemenuhan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	50%

Regulasi Penataan Ruang berupa Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana untuk

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) RTRW Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 dengan nilai persentase 50% apabila tercapai.

Pemenuhan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang berupa keterangan informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dikeluarkan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai persentase 50% apabila tercapai.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 94% dengan pembagian pencapaian realisasi perhitungan sebagai berikut :

Regulasi Penataan Ruang	44%
Pemenuhan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	50%

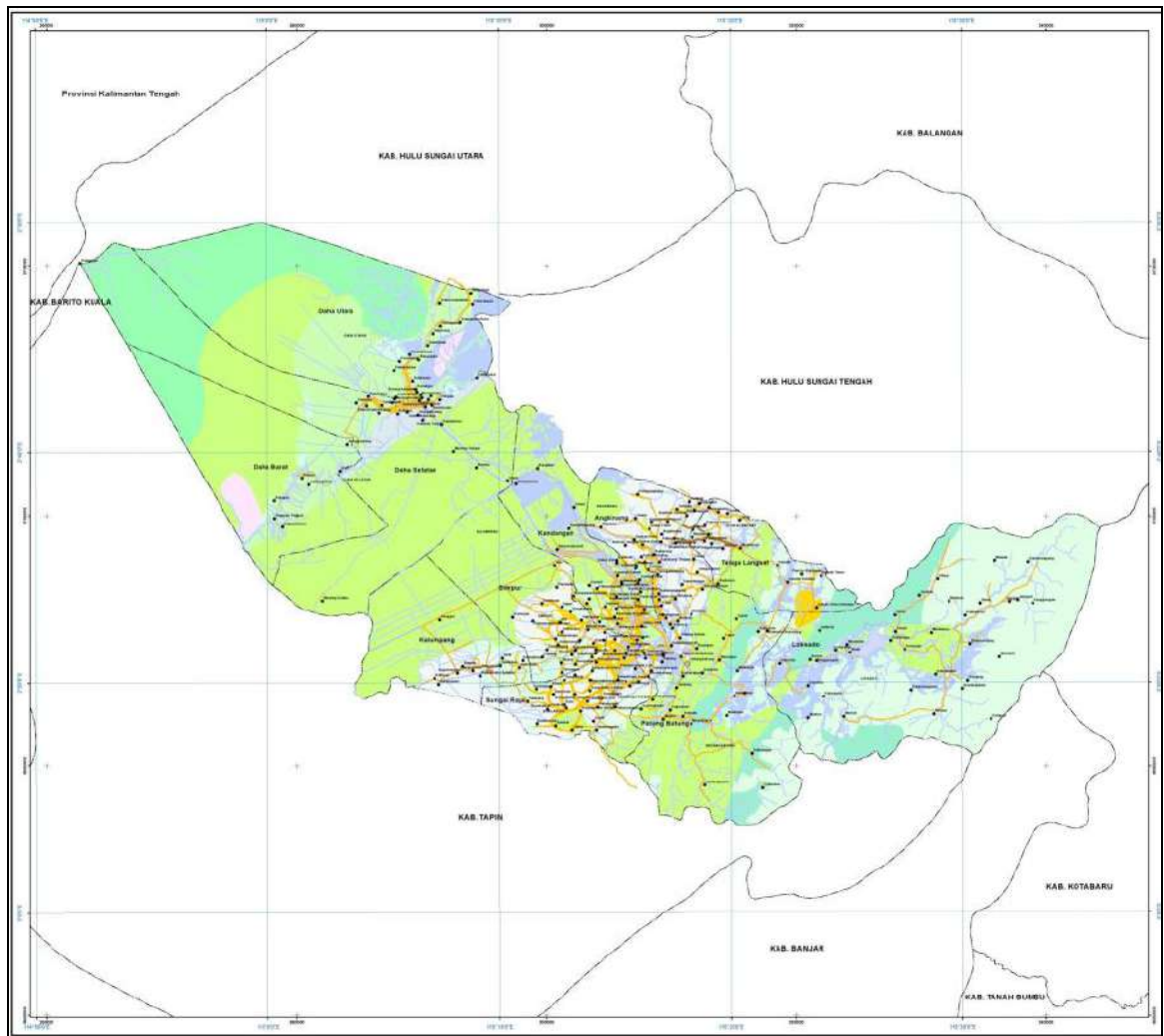
Realisasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Regulasi Penataan Ruang (Tersedianya Dokumen RTRW dan Dokumen RDTR, untuk Dokumen RDTR masih terkendala dengan Pemenuhan unsur Peta Dasar yang data citra satelitnya resolusi tingginya berada di LAPAN dan BIG)	30%
Pemenuhan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Terlaksananya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	50%

Dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang dilakukan dengan cara melakukan cek lokasi rencana pembangunan baik skala kecil /perorangan maupun skala besar berupa investasi atau penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik berupa Perumahan maupun sarana dan prasarana berupa SPBU, Gardu Induk SPBE dan pembangunan lainnya yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana pembangunan atau investasi yang akan masuk ke Kab. HSS akan menyesuaikan dengan rencana pola ruang dimana untuk tertib tata ruang, menjamin tidak adanya konflik di lapangan dan sesuai dengan perencanaan tata ruang di dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



a). Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja 2022

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dengan Target 2022

Sasaran Strategis III :				
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	94%	80%	85,11%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 masih dibawah target hal ini dikarenakan untuk pemenuhan Regulasi Penataan Ruang terkait dengan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terkendala pemenuhan unsur Peta Dasar yang data citra satelitnya resolusi tingginya berada di LAPAN dan Badan Infomasi Geospasial (BIG).

Rincian Perhitungan Realisasi Kinerja 80% pada tahun 2022

Regulasi Penataan Ruang (Tersedianya Dokumen RTRW dan Dokumen RDTR, untuk Dokumen RDTR masih terkendala dengan Pemenuhan unsur Peta Dasar yang data citra satelitnya resolusi tingginya berada di LAPAN dan BIG)	30%
Pemenuhan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Terlaksananya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	50%

b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Lalu

Sesuai dengan Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 maka berikut adalah grafik perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Dengan Rencana Tata Ruang beberapa tahun terakhir.

Grafik Capaian Persentase
Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan
Rencana Tata Ruang dari Tahun 2019 -2022



Pada grafik diatas dapat dilihat capaian target diasumsikan tercapai dikarenakan penyesuaian Renstra yang juga menyesuaikan IKU yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal ini didasarkan pada kondisi awal dimana tahun 2018 berdasarkan evaluasi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada angka 75% dimana hal tersebut perlu dilakukan Peninjauan Kembali RTRW Kab. HSS. Dalam tahun tahun berikutnya dilakukan pengumpulan bahan bahan rencana Revisi RTRW Kab. HSS dan Pengendalian serta pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang sehingga tidak menambah ketidaksesuaian pembangunan dengan Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada tahun 2022 dilaksanakan penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Hulu Sungai Selatan dan Penyusunan Updating data Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kandungan dan Perkotaan Padang Batung hal ini menambah persentase capaian untuk pemenuhan Regulasi Pemanfaatan Ruang sehingga capaian dari angka 75% naik menjadi 80%

c). Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir RENSTRA

Adapun realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.28
Perbandingan Realisasi Persentase Kinerja terhadap target akhir Renstra Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra 2023	Capaian
Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	80 %	100 %	80%

Dari capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021 ini sebesar 80 % dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2023 sebesar 100% masih belum tercapai, maka selanjutnya perlu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja sampai akhir periode Renstra. Sebagai rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mencapai target pada tahun-tahun berikutnya, antara lain :

- 1) Meningkatkan beberapa usulan kegiatan yang Dananya baik bersumber dari APBD Kab.HSS
- 2) Meningkatkan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
- 3) Melakukan Koordinasi dan MOU dengan LAPAN dan BIG untuk Pemenuhan data citra resolusi tinggi untuk penyusunan unsur peta dasar baik skala 1:25.000 untuk Revisi RTRW dan Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR.

d). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja yang digunakan tingkat nasional tersusunnya Rencana Tata Ruang Nasional (RTRW) sedangkan

untuk Kabupaten adalah turunan dari RTRWN tersebut dimana berupa RTRW dan RDTR. Dengan demikian pengukuran indikator kinerjanya berbeda sehingga tidak bisa diperbandingkan.

e). Rekomendasi/Solusi LKIP Tahun sebelumnya dan realiasi pada Tahun 2022

Pada LKIP tahun 2021 sebagai rencana tindak lanjut (action plan) untuk mencapai target tahun 2022, antara lain :

- 1) Meningkatkan beberapa usulan kegiatan yang Dananya baik bersumber dari APBD Kab.HSS
- 2) Meningkatkan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
- 3) Melakukan revisi Perda Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Perda RDTR wilayah Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Pelaksanaan di Tahun 2022 telah dilakukan action plan diatas sebagai mana berikut :

- 1) Dianggarkannya untuk Revisi Materi Teknis RTRW dan Updating RDTR Kawasan Perkotaan Kandangan dan Kawasan Perkotaan Padang Batung
- 2) Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Pemerintahn Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sinkronisasi Revisi RTRWP dengan RTRW Kab HSS
- 3) Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Kementerian Agraria /BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 4) Penyusunan RDTR dilakukan progress updating data RDTR Perkotaan Kandangan dan RDTR Perkotaan Padang Batung.

f). Program dan Kegiatan ynag Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Program dan Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan

rencana tata ruang yaitu melalui Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota dengan pagu dana Rp. 548.150.000,- dalam sub kegiatan ini dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi RTRW serta penyusunan Revisi RTRW Kab. HSS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 410.839.500,- dengan persentase realisasi keuangan 74,95% dan realisasi fisik 100%.



Kegiatan Forum Penataan Ruang Daerah

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota dengan pagu dana Rp. 687.725.000,- dalam sub kegiatan ini dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan updating RDTR Kawasan Perkotaan Kandungan dan Kawasan Perkotaan Padang Batung dengan realisasi anggaran Rp. 237.205.366,- dengan persentase realisasi keuangan 34,49% dan realisasi fisik 100%. Perihal rendahnya realisasi keuangan dikarenakan kegiatan penyusunan unsur Peta Dasar Skala 1:5.000 tidak dilaksanakan karena telah dianggarkan dan dilaksanakan oleh BIG, dan sisa dana menjadi silpa anggaran dan dikembalikan ke kas Pemerintah Kab. HSS



Rapat Penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.HSS



Rapat Updating Data Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Perkotaan Kandungan

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan pagu dana Rp. 193.198.400,- dalam sub kegiatan ini dilaksanakan survey lapangan, cek overlay dalam rangka pemanfaatan ruang baik berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kab. HSS dengan realisasi anggaran Rp 80.406.170,- dengan persentase realisasi keuangan 41,62% dan realisasi fisik 100%. Perihal masih rendahnya realisasi keuangan dikarenakan realisasi honor untuk anggota FPR dari Akademisi dan Tokoh Masyarakat sebagian pada triwulan IV tidak bisa dibayarkan karena perubahan SK FPR dimana untuk anggota IAP dan ASPI berubah dan Tokoh Masyarakat diganti karena beliau meninggal dunia dan dalam menunggu perubahan SK FPR tersebut tidak dapat dilaksanakan rapat FPR.



Kegiatan survey lapangan pemdampingan Tim Terpadu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup verifikasi lapangan usulan perubahan kawasan hutan sehubungan dengan Revisi RTRW Provinsi Kalsel

Adapun penyebab belum tercapainya kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang sesuai target yang ditetapkan , antara lain :

Adapun Penyebab belum tercapainya target pencapaian Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya SDM pada Sub Bidang Tata Ruang terutama operator GIS dan penyusun RTRW dan RDTR
- 2) Menunggu selesainya proses pengerjaan Penyediaan Citra Resolusi Tinggi Oleh Badan Informasi Geospasial baik Skala 1:25.000 untuk RTRW dan Skala 1:5.000 untuk RDTR oleh BIG sebagai data dasar untuk penyusunan unsur peta dasar RTRW dan RDTR

h). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya di Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi lebih kepada penggunaan teknologi baik dalam pelayanan terhadap informasi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Terkait dengan Tata ruang memanfaatkan pada konsultasi melalui Aplikasi Pesan Singkat Whastapp sehingga dalam layanan informasi dapat dijawab secara cepat efisien dan menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas, kemudian dengan website Google Earth dan Google Maps dimana untuk overlay cepat apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi Tata Ruang untuk rencana pemanfaatan ruang.

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Disamping penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Alokasi Dana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100 \%$$

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 145.872.896.349,00 atau 87,26 % dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 167.176.722.438,00.

Tabel 3.29
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Anggaran DPUTR Tahun 2018 s/d. 2022

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran (Perubahan)	Capaian
Tahun 2018	175.350.253.880,00	171.404.320.415,00	97,75 %
Tahun 2019	184.790.252.351,00	177.752.128.548,75	96,19 %
Tahun 2020	116.780.721.798,00	111.763.743.392,00	95,70%
Tahun 2021	209.576.756.935,00	179.362.764.306,00	85,58 %
Tahun 2022	167.176.722.438,00	145.872.896.349,00	87,26 %

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021, namun lebih rendah dari tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan adanya beberapa pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu karena adanya kesulitan mobilisasi orang dan material akibat kondisi alam.

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penunjang Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	Program: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	28.468.965.958,00	27.035.927.383,00	94,97
			Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.285.465.000,00	16.007.510.933,00	92,61
			Sub Kegiatan: Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.702.570.000,00	3.679.159.313,00	99,37
			Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai	13.142.812.500,00	11.906.591.270,00	90,59
			Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	45.712.500,00	29.487.500,00	64,51
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	394.370.000,00	392.272.850,00	99,47
			Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.183.500.958,00	11.028.416.450,00	98,28
			Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
			Sub Kegiatan: Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.125.785.000,00	1.106.267.600,00	98,27
			Pembangunan Bendung Irigasi	252.300.000,00	251.490.800,00	99,68
			Sub Kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	8.896.725.958,00	8.788.598.850,00	98,78
			Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	627.750.000,00	624.236.000,00	99,44
Sub Kegiatan: Operasional Unit Pengelola Irigasi	230.940.000,00	207.823.200,00	89,99			

1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi layak dan air bersih layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Program: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.917.191.036,00	11.863.659.705,00	99,55
			Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.917.191.036,00	11.863.659.705,0	99,55
			Sub Kegiatan: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.517.905.464,00	11.465.923.813,00	99,55
			Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	399.285.572,00	397.735.892,00	99,61
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Program: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.008.749.000,00	10.973.683.040,00	99,68
			Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	448.140.000,00	10.973.683.040,00	99,68
			Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	448.140.000,00	426.060.240,00	95,07
			Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	10.560.609.000,00	10.547.622.800,00	99,88
			Program: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.953.044.000,00	1.923.757.760,00	98,50
			Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,279,219,000	1.923.757.760,00	98,50
	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	220.200.000,00	218.822.000,00	99,37		
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	1.150.350.000,00	1.136.959.500,0	98,84		
	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	582.494.000,00	567.976.260,00	97,51		

1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Program Pembangunan Penataan Bangunan Gedung	22.603.506.000,00	21.220.744.961,00	93,88
			Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.603.506.000,00	21.220.744.961,00	93,88
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	158.894.000,00	124.141.820,00	78,13
			Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	22.444.612.000,00	21.096.603.141,00	93,99
		Indeks Konektivitas Jalan	Program: Program Penyelenggaraan Jalan	81.238.202.380,0	65.723.460.356,00	80,90
			Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.238.202.380,0	65.723.460.356,00	80,90
			Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	5.912.777.380,00	5.007.990.150,00	84,70
			Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	4.821.709.200,00	4.273.926.615,00	88,64
			Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	15.354.031.700,00	15.216.444.846,00	99,10
			Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jalan	30.117.438.100,00	27.936.138.920,00	92,76
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	9.109.264.000,00	9.064.672.095,00	99,51
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	1.775.044.000,00	1.570.457.320,00	88,47
			Sub Kegiatan: Pembangunan Jembatan	12.201.500.000,00	899.640.000,00	7,37
			Sub Kegiatan: Penggantian Jembatan	958.894.000,00	951.258.070,00	99,20
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jembatan	987.544.000,00	802.932.340,00	81,31			

1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	Program: Program Pengembangan Jasa Konstruksi	650.593.650,0	156.167.609,00	24,00
			Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	402.039.200,00	23.980.389,00	46,43
			Sub Kegiatan: Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10.000.000,00	7.119.800,00	71,20
			Sub Kegiatan: Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	86.850.000,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi	6.000.000,00	2.541.600,00	42,36
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	267.900.000,00	14.318.989,00	5,34
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	21.299.200,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	9.990.000,00	0,00	0,00
			Kegiatan : Penyelenggaraan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.554.900,00	26.298.220,00	26,15
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruks	24.999.000,00	21.658.320,00	86,64
			Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4.999.900,00	4.639.900,00	92,80
			Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	3.426.000,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	3.426.000,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	3.426.000,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	3.426.000,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7
			Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja ProyekKonstruksi	3.426.000,00	0,00	0,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	3.426.000,00	0,00	0,00
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100.554.900,00	105.889.000,00	71,55
			Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	147.999.550,00	105.889.000,00	71,55
			Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	570,813,000	117,939,250	20.66
			Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	548.150.000,00	410.839.500,00	74,95
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	548.150.000,00	410.839.500,00	74,95
			Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	687.725.000,00	241.685.356,00	35,14
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	687.725.000,00	241.685.356,00	35,14
			Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	57,544,000	49,381,500	85.82
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	193.198.400,00	63.154.340,00	32,69

1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.907.397.014,00	6.259.816.339,00	79,16
			Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.974.800,00	6.969.650,00	99,93
			Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.849.900,00	5.844.750,00	99,91
			Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.124.900,00	1.124.900,00	100,00
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.945.030.714,00	4.472.024.881,00	75,22
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.941.281.164,00	4.468.278.431,00	75,21
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.499.750,00	1.499.750,00	100,00
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.124.900,00	1.124.700,00	99,98
			Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.124.900,00	1.122.000,00	99,74
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	919.085.150,00	885.068.851,00	95,10
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.068.000,00	4.696.000,00	92,66
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	398.445.600,00	384.521.303,00	96,51
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.887.500,00	35.400.000,00	84,51
			Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.384.050,00	57.657.500,00	81,92
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	399.494.048,00	96,30			

1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.450.000,00	131.433.597,00	63,05
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.200.000,00	128.633.597,00	63,62
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.250.000,00	2.800.000,00	44,80
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828,026,350	764.319.360,00	79,16
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kantor dan Bangunan Lainnya	697.486.350,00	641.936.760,00	92,04
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.488.000,00	43.388.640,00	93,33
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.882.000,00	78.993.960,00	94,17
			Jumlah	167.176.722.438,00	145.872.896.349,00	87,26

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2022 tidak mencapai 100 %. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan akibat penolakan masyarakat pemilik tanah atas nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh tim penilai harga dan adanya efisiensi terkait proses pengadaan barang dan jasa, dimana nilai kontrak lebih rendah dari anggaran yang disediakan.

3.2 Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional dan Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara mandiri sepanjang tahun 2022 belum pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkontribusi terhadap pencapaian beberapa penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penghargaan *Inovation Government Word*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja Tahun 2022, maka capaian masing-masing IKU Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :
 - a. Indeks Konektivitas Jalan terealisasi 3.635 lebih tinggi dari target 3.628 atau capaian kinerjanya 100,19% dari target yang ditetapkan.
 - b. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi terealisasi 70,47% lebih tinggi dari target yaitu 69,10% atau capaian kinerjanya 101,98% dari target yang ditetapkan.
 - c. Persentase bangunan publik yang berfungsi baik terealisasi 85,71% telah mencapai target yaitu 85,71% atau capaian kinerja 100 % dari target yang ditetapkan.
 - d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terealisasi 77,01% lebih tinggi dari target yaitu 85,00% atau capaian kinerjanya 102,36% dari target yang ditetapkan.
 - e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman terealisasi 85,44% lebih tinggi dari target 84,40% atau capaian kinerjanya 101,23% dari target yang ditetapkan.
 - f. Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang terealisasi 80,00% lebih rendah dari target 90,00% atau capaian kinerjanya 85,11% dari target yang ditetapkan.

2. Faktor penunjang tercapainya kinerja yang ditargetkan antara lain :
 - a. Adanya program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. Sinergitas sumber pendanaan dari APBD sumber DAU dan DAK serta tugas pembantuan, yang berkontribusi dalam meningkatkan indeks konektivitas jalan, kinerja sistem jaringan irigasi, keberfungsian bangunan publik serta akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi.
3. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

Ketergantungan dengan instansi lain karena menunggu selesainya proses pengerjaan Penyediaan Citra Resolusi Tinggi Oleh Badan Informasi Geospasial baik Skala 1:25.000 untuk RTRW dan Skala 1:5.000 untuk RDTR oleh BIG sebagai data dasar untuk penyusunan unsur peta dasar RTRW dan RDTR, disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai operator GIS. Hal ini menyebabkan belum tercapainya target penyelenggaraan tata ruang.

4.2 REKOMENDASI

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi, dengan berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya untuk formasi keahlian tata ruang.

2. Menyiapkan anggaran kegiatan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
3. Menghindari penganggaran pekerjaan fisik di anggaran perubahan sebagai antisipasi kondisi alam dan waktu yang sempit dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikhawatirkan tidak selesainya pekerjaan .